



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
**BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR**

JALAN DAKOTA NO. 24, MAKASSAR 90241

TELP : (0411) 4813452, 4813539 (Hunting), 874793 (Laboratorium), LAMAN : bkipmmakassar@kcp.go.id

Nomor : B. 888 /BBKIPM.MKS/TU.120/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024

16 April 2024

Yth. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan kinerja periode triwulan I Tahun 2024 pada Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja (terlampir).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pdt. Kepala,

Mohammad Zamrud



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

TRIWULAN I



#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkearifan
Berkeadilan Berprestasi Berkeadilan Berkearifan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan I tahun 2024 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



Makassar, 16 April 2024
Pdt. Kepala

Mohammad zamrud

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
1. Capaian Kinerja	11
2. Analisis dan evaluasi	13
IK1. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	14
IK2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	22
IK3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	30
IK4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	35
IK5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	48
IK6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	56
IK7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	67
IK8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	72
IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	83
IK10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	88
IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	91
IK12. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	95



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK13. Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	102
IK14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	110
IK15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	117
IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	125
2. Rekomendasi	125

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerjasama (PK) tahun 2024

2. Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	1
IK2.	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	6
IK3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	12
IK4.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	19
IK5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	29
IK6.	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	36
IK7.	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	43
IK8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	46
IK9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	54
IK10.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	57
IK11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	60
IK12.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	62
IK13.	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	66
IK14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	71
IK15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	75

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 111,59 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 15 (lima belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024 semuanya mencapai target.
- B. Uraian Indikator Kinerja Utama KU yang capainnya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)
 2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)
 3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)
 4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)
 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)
 6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)
 7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi
 8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)
 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
 12. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
 13. Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
15. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 12,360,690,000 dan realisasi 3,709,998,035 atau 30.01%

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasann Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. (BPPMHKP). Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara mitra, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI, Unit Penanganan dan/atau pengolahan yang menerapkan sistem *traceability*, Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.
2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar, Unit kerjayang menerapkan sistem pengendalian (*Official control*), lingkup otoritas kompeten, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang mendukung Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “ Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelola, kemaritiman, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Aspek yang berkaitan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BKIPM

Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu :

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan

MISI

1

Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

2

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

3

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan Tata kelola pemerintahan di KKP

2. Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan , maka

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP |

3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

BKIPM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.44/BKIPM/2020. Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BKIPM pada 2023, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan I tahun 2024 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Rasio Dispor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	-	-	99,99	99,99	101,99	99	99	100	101	101	-	-
	2 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	-	-	5	4	4	4	1	2	200	50	4	4
	3 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	-	8	15	21	25	60	15	15	100	25	-	-
	4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) nuang Lingkup pada UPI	-	239	312	374	335	345	35	84	153	24	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5	-	-	-	89,8	91,12	84	84	91,60	109,0	109,0	-	-
	6	-	-	-	-	-	1	1	1	100	100,0	-	-
	7	-	-	-	4	2	18	0	0	0,0	0,0	-	-
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/KIP	8	-	68,01	81,44	82,23	90,27	84	0	0	0	0,0	-	-
	9	-	91,93	98	95,3	87,13	82	0	0	0	0,0	-	-
	10	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100,0	-	-
	11	-	82	65	100	100	80	80	100	125	125	-	-
	12	-	88	89	99,44	96,38	93,76	93,76	74,91	79,89	79,89	-	-
	13	-	-	86	87,87	86,2	82	0	0	0	0,0	-	-
	14	-	-	-	79,56	78,26	80	0	0	0	0,0	-	-
15	-	-	-	100	99,83	80	0	0	0	0,0	-	-	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Startegis 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional, maka diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . Adapun penjelasan pencapaian 4 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Target
<p>Terselenggaranya Pengendalian dan Pngawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	<ol style="list-style-type: none">1. 99 %2. 4 Lokasi3. 60 UPI4. 345 sertifikat

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK 1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	-	-	99,99	99,99	102	99	99	100	101	101

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik;

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada Triwulan I 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat, adapun pada Triwulan I 2023 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45.247 ton senilai Rp. 2,1 T dengan jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang diterbitkan sebanyak 2.195 sertifikat.

Indikator Kinerja efektifitas Ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya sertifikat mutu (HC) di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Pada Triwulan I 2024 Bulan Januari terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa *Frozen Flying Fish Roe* sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan, penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

dimana :

A : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang terbit}} \times 100\%$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi, Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan

B : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC mutu ekspor yang terbit}} \times 100\%$

$$: \frac{2.444 - 0}{2.444} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, terjadi peningkatan persentase yaitu 99,97% di triwulan I 2023 menjadi 100% di triwulan I 2024.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I 2024	Persentase Realisasi
1	3989.ADF.001.051.a. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	Rp. 25.925.000,-	Rp. 11.177.000,-	43,11 %
2	3989.ADF.001.051.b. Bimbingan Teknis CPIB Supplier	Rp. 6.575.000,-	0	0
3	3989.ADF.001.051.c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.631.000,-	48,41 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

4	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 20.000.000,-	Rp. 985.000,-	4,92%,
---	---	------------------	---------------	--------

Sertifikasi CPIB pada supplier produk perikanan pada TW I 2024 terealisasi sebanyak 6 unit supplier dengan penyerapan anggaran sebesar 43,11 %, sedangkan untuk Bimtek CPIB pada supplier belum dilaksanakan karena menunggu arahan pelaksanaan jadwal dari Pusat Pengendalian Mutu.

Alokasi anggaran kegiatan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra sebesar Rp. 7.500.000,- adapun realisasi anggaran sampai Triwulan I sebesar Rp. 3.631.000,- atau 48,41 %, sisa anggaran akan dialokasikan ke kegiatan pengendalian mutu yang lain karena kegiatan ini sudah terealisasi seluruhnya sebanyak 5 UPI pada Triwulan I 2024.

Kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan I 2024 belum dilaksanakan dikarenakan tidak ada laporan kasus mutu, Adapun alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 985.000,- atau 4,92 % untuk pengadaan ATK.

Dengan demikian total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.793.000,- atau 41,94%

Akar Permasalahan

Potensi masalah dapat terjadi jika petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC).

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

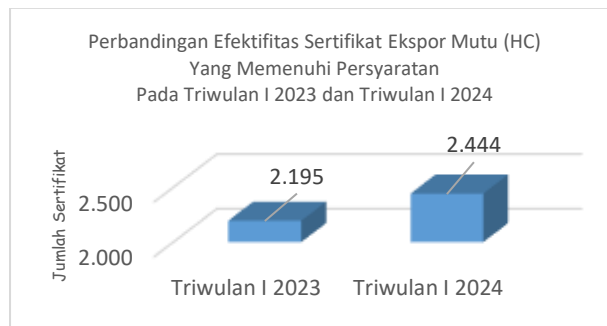
TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait ketentuan negara tujuan ekspor pada tanggal 29 Januari 2024;
- Telah dilaksanakan Sharing Session dengan Inspektur Mutu dan petugas verifikator terkait pelayanan sertifikasi dan pengujian produk perikanan pada tanggal 18 Maret 2024;
- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat.

Rekomendasi rencana aksi

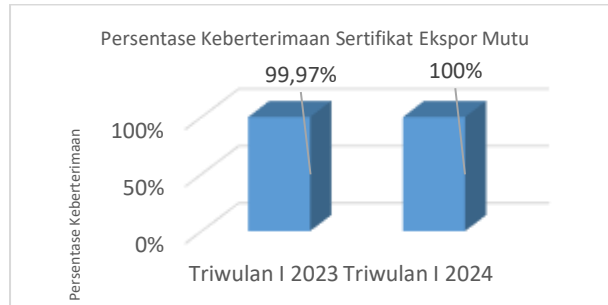
Meningkatkan komunikasi (sharing session) dengan petugas verifikator dan inspektur mutu terkait persyaratan dalam rangka penerbitan sertifikat mutu (HC)



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Mutu Hulu Hilir



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



Kegiatan Sharing Session Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Kegiatan Inspeksi CPIB di Supplier



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK2. Penjaminan Mutu Hasil Perikanan di wilayah RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	-	-	5	4	4	4	1	2	200	50

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.

Pada triwulan I tahun 2024 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 2 lokasi kabupaten dengan jumlah 4 lokus yaitu:

1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Minasamaupa Sungguminasa dan Pasar Balang-Balang.
2. Kabupaten Takalar sebanyak 2 lokus yaitu PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, PPI/TPI.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional dan PPI/TPI serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di 4 lokus dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya dan telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, Formalin. Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu. Sedangkan untuk pengujian histamine masih dalam proses pengujian karena dilakukan di laboratorium Sub. Kontrak.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya
2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan
3. Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu
4. Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
5. Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Pendukung	Anggaran TH. 2024	Realisasi Tw I TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya	92.000.000	1.090.000	1.18	90.910.000
2	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan	20.000.000	-	-	20.000.000
3	Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu **	980.000.000	-	-	980.000.000
4	Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran **	3.000.000	-	-	3.000.000
5	Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha**	16.420.000	-	-	16.420.000

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik sebesar Rp. 77.240.000 yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929 atau 13,82%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.16.086.721, maka realisasi anggaran triwulan I 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 33,6%.

Jika alokasi anggaran tersebut ditotalkan dengan seluruh anggaran kegiatan pendukung, maka total anggaran sebesar Rp. 1.188.660.000.

Untuk kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya terealisasi sebesar 1,18% untuk pembelian sampel uji. Sedangkan anggaran perjalanan dinas untuk satu lokasi yang menjadi target triwulan I (TPI Beba) Takalar.

Diantara kegiatan pendukung indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA) yaitu Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu sedangkan kegiatan Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha masih diblokir karena menunggu terbentuknya SOTK UPT.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 18 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Perikanan Kabupaten, BBPOM Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar permasalahan

Hasil Penilaian terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hygiene di sentra penyedia pangan sehat (pasar tradisional balang-balang dan pasar sentral Takalar) menunjukkan kondisi **Cukup**. Sementara untuk penyedia sentra pangan yang lain menunjukkan kondisi **Baik**

Tindakan yang telah dilaksanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 yaitu sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi pada tanggal 16 februari 2024 dan melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 2 lokasi yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Rekomendasi rencana aksi

Menyampaikan hasil pengawasan mutu domestik dan rekomendasi kepada dinas kabupaten/kota yang hasil penilaian sarana dan prasarananya menunjukkan kondisi Cukup.

- a. **Rapat Koordinasi dengan instansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik terkait 16 Februari 2024**



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



- b. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2024 Kab. Gowa
- Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic di Pasar Minasa Maupa dan pasar Balang-balang Kab. Gowa



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar Kab. Takalar



Rangkaian kegiatan pengujian mikrobiologi dan kimia dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	-	8	15	21	25	60	15	15	100	25	-	-

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor komoditi perikanan. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan ditelusuri;

Realisasi kegiatan verifikasi traceability sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 15 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari target 15 UPI sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun lokus UPI/UPRL yang telah dilakukan verifikasi traceability disajikan pada tabel berikut.

No	Nama UPI	Alamat
1.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi – Indonesia
2.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia
3.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Kima 4 Kav. P 3B, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia
4.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulya	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi – Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

5.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD 15-16, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
6.	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	PT. Niaga Adijaya Mandiri	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
8.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV Kav P3A, Kel. Daya. Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
9.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi – Indonesia
11.	CV. BUANA LAUT NUSANTARA	Jl. Kima VI Kav F1/B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
12.	CV. Mitra Alam	Jl. Lantebung No. 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. GLOBAL MAJU PRATAMA	Pattene Business Park Blok H No. 2, Desa Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
14.	CV. Sumber Bahari Mandiri	l. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	CV. RESKY BAHARI	Jl. Poros Makassar-Maros KM 24 Lingkungan Ballu Ballu, Kel. Tarooda, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia

Pada tahun 2024 target pelaksanaan verifikasi traceability adalah sebanyak 60 UPI, dan pada periode triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebanyak 15 UPI dari yang ditargetkan 15 UPI, sehingga tingkat capaiannya 100%;

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 25 UPI, maka terjadi peningkatan target sebanyak 35 UPI atau 140%;

Realisasi pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 UPI dari 4 yang ditargetkan atau capaiannya 100% sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2024;

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi traceability pada 15 UPI tersebut diketahui bahwa seluruh UPI tersebut telah mengimplementasikan sistem

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

traceability dan mampu telusur terhadap produk yang dihasilkan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir;

Sebagai bukti penerapan traceability maka Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) Hasil Perikanan dan akan diserahkan kepada pihak UPI/UPRL yang bersangkutan;

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan verifikasi traceability, didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 16 orang yang merupakan pejabat Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar;

Guna menunjang kegiatan verifikasi traceability, disediakan anggaran sebesar Rp. 210.060.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.280.000,- (2,51%) yang terdiri dari perjalanan dinas, sedangkan Pagu anggaran Traceability pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 25.500.000,- dan terealisasi pada TW I TA 2023 sebesar Rp. 4.330.000,- (16,98%) terdiri dari Belanja ATK komputer Suplier dan perjalanan evaluasi penerapan traceability.

Dapat terlihat bahwa penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2024 lebih rendah dari pada TW I 2023 sebesar (14,47%). Hal ini di sebabkan adanya anggaran kegiatan bimtek sebesar Rp. 165.000.000,- (78,55 %) yang belum direalisasikan dan menunggu arahan dari Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar masalah

Meskipun hasil verifikasi traceability menunjukkan ke 15 UPI telah tertelusur, namun pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan sistem traceability masih belum optimal, terutama pada unit pengolahan ikan dengan ruang lingkup produk segar dan kering dan UPI Baru

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pada Januari 2024 telah di susun dan di tetapkan program pelaksanaan traceability dengan target 60 UPI/UPRL dengan memprioritaskan UPI/UPRL yang memiliki grade HACCP A dan B
- Kegiatan verifikasi traceability telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/tahun 2019 tentang Penerapan system ketelusuran di Unit Pengolahan Ikan
- Pada tanggal 18 Maret 2024 dilaksanakan kegiatan *Sharing Session* Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang salah satu materinya adalah sosialisasi Per Ka BKIPM No. 170/tahun 2019

Rekomendasi rencana aksi

- Memanfaatkan kegiatan traceability pada UPI/UPRL sebagai sarana sosialisasi untuk peningkatan pemahaman tentang penerapan system traceability di UPI/UPRL

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Dokumentasi Kegiatan Traceability di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Prima Bahari Inti Lestari



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Dokumentasi Kegiatan Sharing Session 18 Maret 2024



IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup Produk pada UPI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang Lingkup pada UPI	-	239	312	374	335	345	55	84	152	24	-	-

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJKMHP pada setiap UPI. Persyaratan SJKMHP meliputi program persyaratan dasar (PPD),

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (*On Site Visit*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan untuk melihat penerapan sistem HACCP yaitu suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan yang telah diterapkan oleh UPI/UPRL. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat HACCP yang dilaksanakan 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun baik untuk UPI baru maupun perpanjangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan monev dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap UPI yang telah disertifikasi dan diterbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis and Critical Control*

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Point (HACCP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan manual IKU BKIPM tahun 2024 bahwa formula IKU diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical Control Point* (PMMT/HACCP). Nilai tersebut merupakan penggabungan dari hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan Sertifikat yang diterbitkan pada tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP dengan rumus :

$$A = B + C$$

A = Ruang lingkup produk yang disertifikasi PMMT/HACCP

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan sertifikat yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monev

$$\begin{aligned} A &= 32 + 52 \\ &= 84 \text{ sertifikat.} \end{aligned}$$

Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama TW I Tahun 2024 adalah sebanyak 84 sertifikat dari target 55 sertifikat ruang lingkup HACCP atau sebesar 152%. Jumlah tersebut terdiri dari 32 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan inspeksi PMMT/HACCP dan 52 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan monev

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

PMMT/HACCP. Peningkatan capaian kinerja melebihi target sebesar 29 ruang lingkup atau 52% disebabkan karena:

1. Adanya permohonan sertifikasi baru
2. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup
3. Adanya permohonan kenaikan grade

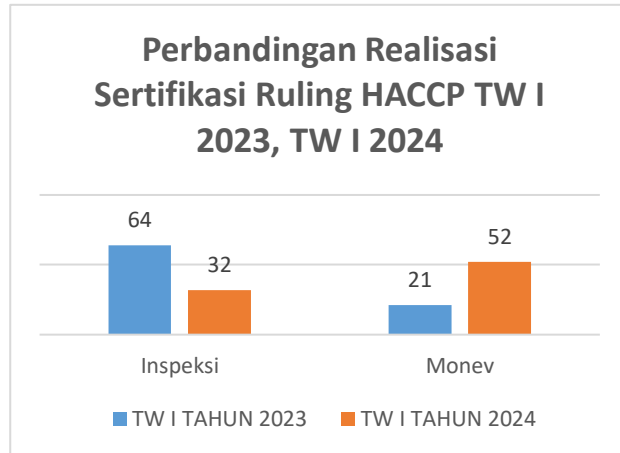


Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2023, capaian realisasi jumlah sertifikat ruling HACCP pada TW I Tahun 2024 mengalami penurunan dari 85 sertifikat menjadi 84 sertifikat atau sebesar 1,18%. Fluktuasi capaian realisasi ini berada di luar kendali dikarenakan pelaksanaan kegiatan didasarkan pada permohonan dari unit pengolahan ikan / unit pengolahan rumput laut

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama tahun 2024 adalah 17 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Calon Inspektur mutu untuk kegiatan money PMMT/HACCP. Jumlah ini beda dengan TW I Tahun 2023 sebanyak 26 orang. Penurunan ini disebabkan karena ada transformasi organisasi sehingga sebanyak 11 orang mutasi alih tugas ke Badan Karantina Indonesia.

Anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.445.000 atau 14,96 %, yang terdiri atas belanja bahan ATK dan Komputer Suplies Rp. 575.000, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 12.380.000, belanja perjalanan dalam kota Rp. 6.490.000

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 12.748.000 atau 9,44% dari total anggaran Rp.135.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW I 2024 sebesar 5,52%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar permasalahan

Terdapat beberapa UPI/UPRL yang terlambat melakukan perpanjangan HACCP karena SKP kadaluarsa, sehingga harus dilakukan penolakan permohonan terhadap 3 UPI yang bermohon

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
2. Pada tanggal 26 februari s.d 1 maret tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan HACCP terhadap inspektur mutu di seluruh UPT BPPHKP dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari 2 orang dari BPPMHKP Makassar, dari UPI sebanyak 2 orang dan dari UPT lain sebanyak 36 orang Bertempat di hotel Novotel Makassar.
3. Telah dilaksanakan *sharing session* inspektur mutu pada tgl 18 maret 2024 di aula BPPMHKP Makassar yang salah satu materinya adalah Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
4. Penanggung jawab kegiatan telah memantau masa berlaku sertifikat HACCP setiap UPI/UPRL melalui aplikasi HACCP Online Sistem dan berkomunikasi secara intensif dengan pihak UPI/UPRL untuk mengantisipasi keterlambatan permohonan dari pihak UPI/UPRL yang dapat berdampak pada kelancaran ekspor UPI yang bersangkutan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan *uploading* dokumen inspeksi di aplikasi HONEST untuk mendukung kelancaran proses penerbitan Sertifikat HACCP sesuai dengan janji layanan.

Rekomendasi rencana aksi

Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi lebih awal dengan pihak UPI/UPRL terkait pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan sertifikasi HACCP.

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Triwulan I Tahun 2024

No.	Nama UPI / UPRL	Produk	Grade	Keterangan
1	PT. Anugrah Cahaya Samudera	Dried Sea Cucumber	B	Inspeksi
		Dried Seaweed	B	
		Dried Shark Fin	B	
2	CV. Anugrah Jaya Fishery	Fresh Demersal Fish	B	Inspeksi
3	PT. Anugrah Kelautan Abadi	Dried Seaweed	B	Inspeksi
4	PT. Anugrah Mapan Jaya	Dried Seaweed	B	Inspeksi
5	CV. Asryl Perkasa	Fresh Tuna	B	Inspeksi
6	PT. Dunia Marine Products	Dried Flying Fish Roe	B	Inspeksi
		Frozen Cooked Abalone Meat		
7	CV. Guna Agung	Dried Seaweed	B	Inspeksi
8	CV. Guna Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Inspeksi
9	PT. Keumkang Industri Indonesia	Dried Cephalopods	B	Inspeksi
		Dried Fish	B	
		Dried Shrimp	B	
		Fresh Demersal Fish	B	
		Frozen Cephalopods	B	
		Frozen Demersal Fish	B	
		Frozen Lobster	B	
		Frozen Pelagic Fish		
		Frozen Raw Shrimp		
Frozen Tuna				
10	CV. Lemo dan Bungsi	Dried Seaweed	C	Inspeksi
11	PT. Lontara Jaya Sakti	Fresh Demersal Fish	B	Inspeksi
		Fresh Pelagic Fish	B	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

		Frozen Shellfish Frozen Tuna	B B	
12	PT. Mari Sejahtera	Dried Seaweed	A	Inspeksi
13	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Frozen Cephalopods	B	Inspeksi
14	CV. Sore Dangkang	Dried Seaweed	B	Inspeksi
15	PT. Sukses Raya Food	Fresh Tuna Frozen Tuna	A A	Inspeksi
16	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Frozen Cooked	B	Inspeksi
17	PT. Asia Sejahtera Mina TBK	Dried Seaweed	B	Monev
18	PT. Sumber Gratia Mandiri	Dried Seaweed	B	Monev
19	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Fresh Slipper Lobster Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Slipper Lobster	A A A A A	Monev
20	PT. Global Maju Pratama	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	A A A A	Monev
21	CV. Anugrah Lestari	Dried Fish Maw Dried Fish Skin Dried Sand Worm Dried Sea Cucumber	B B B B	Monev
22	CV. Karya Murni	Dried Abalone Dried Sea Cucumber Dried Shark (Fin, Skin, Bone) Frozen Sea Cucumber	B B B B	Monev
23	PT. Biru Laut Nusantara	Fresh Crab Fresh Milkfish Fresh Pelagic Fish Fresh Slipper Lobster Fresh Tuna Frozen Crab Frozen Demersal Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna Frozen Milkfish	B B B B B B B B B B B B	Monev

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

24	CV. Guna Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Monev
25	Kospermindo, Koperasi	Dried Seaweed	B	Monev
26	PT. Bantimurung Indah	Alkali Treated Cottonii Dried Seaweed Semi Refined Carragenan	B B B	Monev
27	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	A A A	Monev
28	PT. Bahari Makmur Sejati Cabang Makassar	Frozen Shrimp	C	Monev
29	PT. Chenwoo Fishery	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Tuna	A A A A A	Monev
30	PT. Ocean Champ Seafood	Pasteurized Crabmeat	B B	Monev
31	PT. Biota Laut Ganggang	Agar-Agar Powder Dried Seaweed Seaweed Powder	B B	Monev

Kegiatan Inspeksi penerapan PMMT/HACCP



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Inspeksi penerapan PMMT/HACCP



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan *sharing session* inspektur mutu pada tanggal 18 Maret 2024



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Kegiatan Pelatihan HACCP Dasar



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Startegis 2

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Pengendalian dan pengawasan sistem mutu keamanan hasil karantina secara profesional, maka diperlukan dukungan 3 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 3 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
<p>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar2. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (<i>Official control</i>) lingkup Otoritas Kompeten3. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	<ol style="list-style-type: none">1. 84 Indeks2. 1 Unit3. 18 Lokasi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	89,8	91,12	84	84	91,60	109,0	109,0

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :

1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Impor**)
3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (**PMMT/ HACCP**)
4. **Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Formula Isaac & Michael
 $S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
 dimana $df = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$S = \underline{46.092} = 42.766 \approx 43$

PUSMATA, KKP, BSS

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	20	14	30	21
15	14	250	144	500	257
20	19	340	146	600	303
25	24	390	150	700	350
30	29	390	150	800	400
35	32	470	159	900	450
40	36	550	162	1000	500
45	40	590	166	1100	550
50	44	680	169	1200	600
55	48	770	173	1300	650
60	52	860	177	1400	700
65	56	950	181	1500	750
70	59	1040	185	1600	800
75	63	1130	189	1700	850
80	66	1220	193	1800	900
85	70	1310	197	1900	950
90	73	1400	201	2000	1000
95	76	1490	204	2100	1050
100	80	1580	207	2200	1100
110	86	1770	213	2300	1150
120	92	1960	219	2400	1200
130	97	2150	225	2500	1250
140	103	2340	231	2600	1300
150	108	2530	237	2700	1350
160	113	2720	243	2800	1400
170	118	2910	249	2900	1450
180	123	3100	255	3000	1500
190	127	3290	261	3100	1550
200	132	3480	267	3200	1600
210	136	3670	273	3300	1650

Jumlah sertifikat yang terbit pada Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 2.444 sertifikat, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.600 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 335 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 257, hal ini tidak memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya transformasi kelembagaan dimana personil penanggungjawab kegiatan sebelumnya telah beralih tugas ke Badan Karantina Indonesia sehingga penyampaian pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan I Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 257 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,66 atau sebesar 91,60 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,65 atau capaian 100,3%. Apabila data Hasil IKM Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan dengan TW IV Tahun 2023, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :

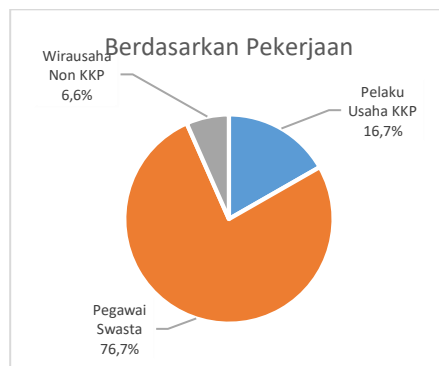
LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

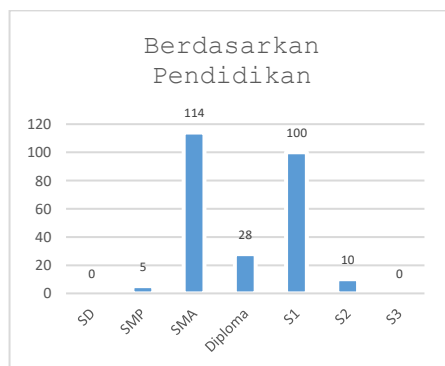
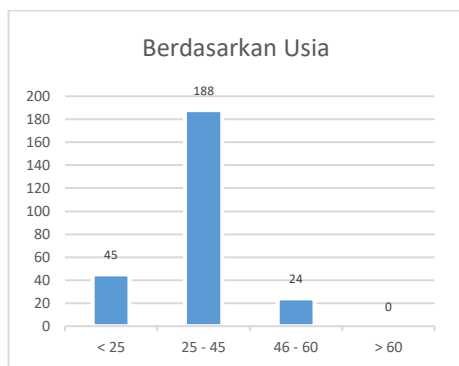
TAHUN 2024

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan IV - 2023	Triwulan I - 2024	
1	Kesesuaian persyaratan	3,680	3,716	↑
2	Kemudahan prosedur	3,610	3,603	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,669	3,623	↓
4	Kesesuaian biaya	3,669	3,704	↑
5	Kesesuaian produk	3,664	3,712	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,630	3,626	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,540	3,588	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,620	3,689	↑
9	Kualitas isi/konten	3,723	3,716	↓

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2024 yaitu :



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kemudahan dalam penggunaan fitur.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode yang sama pada tahun 2023, maka nilai IKM pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dari 3,60 menjadi 3,66. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 belum ada atau sebesar Rp. 0,-, karena anggaran yang ada masih diblokir dan belum dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

Total realisasi anggaran sampai dengan saat ini adalah sebesar 0%, dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran
		TW lalu	TW ini	s.d. TW ini	
Belanja bahan	5.500.000	0	0	0	5.500.000
Belanja perjalanan dinas biasa	7.000.000	0	0	0	7.000.000
Total	12.500.000	0	0	0	12.500.000

Akar masalah

- Jumlah responden SKM di Triwulan I Tahun 2024 tidak sesuai dengan formula Isaac & Michael sebesar 335 responden. Untuk itu perlu penunjukan customer service pelayanan yang baru untuk menangani Survei Kepuasan Masyarakat pada kegiatan pelayanan sertifikasi HC Ekspor.
- Dari hasil pengisian kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat beberapa kritik dan saran untuk unsur kemudahan dalam penggunaan fitur sebagai berikut :
 - Aplikasi Honest kadang lambat dan kadang data yang telah diinput tidak tersimpan
 - Kesulitan dalam penggunaan aplikasi SSm Ekspor

Untuk aplikasi honest, server aplikasi berada di pusat pengendalian mutu sehingga penyelesaiannya berupa koordinasi dengan Pusat PM mengenai penggunaan aplikasi honest agar dapat lebih lancar diakses dan data yang telah diinput dapat tersimpan.

Untuk aplikasi SSm Ekspor, kewenangannya berada pada Kementerian Keuangan sehingga penyelesaiannya berupa koordinasi dengan LNSW dan Bea Cukai Makassar dalam penyelesaian layanan yang menggunakan SSm Ekspor.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan briefing pagi petugas pelayanan dan pengawasan pada tanggal 11 Januari 2024. Briefing pagi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BBKIPM Makassar dengan tujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu menjaga sikap dalam memberikan pelayanan.
- Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait cara pengisian survey Kepuasan Masyarakat pada tanggal 26 Maret 2024 oleh Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam kegiatan sosialisasi ini dipaparkan maksud dan tujuan survei kepuasan masyarakat, jenis layanan Balai Besar KIPM Makassar, hasil survei kepuasan masyarakat sebelumnya, dan permasalahan yang ada dengan pengisian kuisioner yang tidak sinkron antara penilaian dan saran yang diberikan.

Rekomendasi rencana aksi

- Tindakan perbaikan terhadap unsur yang memiliki nilai terendah, yaitu unsur kemudahan dalam penggunaan fitur berupa koordinasi dengan Pusat PM dan Bea Cukai Makassar dalam penggunaan aplikasi Honest dan Aplikasi SSm Ekspor
- Peningkatan jumlah responden dengan cara pemberian link kuisioner kepada pengguna layanan setiap kali selesai pemberian layanan kepada pengguna jasa
- Penetapan petugas Customer Service untuk kegiatan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



IK6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (official control) lingkup Otoritas Kompeten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1 Unit Kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control)	-	-	-	-	-	1	1	1	100,00	100

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan;

Surveilans merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) berjalan secara konsisten dan efektif;

Tujuan dilaksanakannya surveilan adalah untuk memastikan penerapan GMP-SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut berjalan secara konsisten dan efektif yang nantinya menjadi data dukung dalam penyusunan laporan surveilan tahunan. Hasil dari surveilan menjadi dasar bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate /HC*)

Output dari pelaksanaan surveilan adalah penerbitan Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yaitu surat keterangan yang diberikan kepada UPI/UPRL yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara efektif

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan surveilan sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL);

Berdasarkan program tahunan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP lingkup Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 yang telah disusun, pada triwulan I Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL, dari target 100 dapat direalisasikan 91 sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar **91%**.

Adapun 9% yang tidak terealisasi disebabkan adanya unit pengolahan ikan yang tidak melakukan kegiatan proses produksi dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai dari pihak UPI yang bersangkutan. Dengan demikian sistem pengendalian (*Official Control*) pada triwulan I terealisasi sebanyak 1 unit.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 184.440.000,- yang digunakan untuk :

- (1) Belanja bahan sebesar **Rp. 960.000,-**;
- (2) Belanja barang persediaan bahan baku sebesar **Rp. 47.000.000,-**
- (3) Belanja perjalanan dinas biasa sebesar **Rp. 109.180.000,-**
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar **Rp. 27.300.000,-**

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 41.934.800,-** atau **22,74%**, dengan rincian seagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Belanja bahan	960.000	885.000	75.000
2	Belanja barang persediaan bahan baku	47.000.000	1.925.000	45.075.000
3	Belanja perjalanan dinas biasa	109.180.000	26.483.800	82.696.200
4	Belanja perjalanan dinas dalam kota	27.300.000	12.641.000	14.659.000
	Jumlah	184.440.000	41.934.800	142.505.200

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023;

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 14 orang Inspektur Mutu dan 2 orang asisten inspektur mutu. Sehubungan dengan banyaknya program kegiatan pengendalian yang harus dilaksanakan dan adanya keterbatasan jumlah IMUT dan AIMUT maka kegiatan ini melibatkan 2 orang pejabat fungsional APK APBN yang telah memiliki Nomor Registrasi Inspektur Mutu sebagai anggota

Akar permasalahan

Sebagian Inspektur Mutu tidak tepat waktu dalam melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh unit pengolahan ikan serta lambatnya inspektur mutu menyerahkan berkas surveilan kepada penanggung jawab kegiatan, sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan SKHS.

Tindakan yang telah dilaksanakan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Melaksanakan kegiatan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada unit Pengolahan ikan/unit Pengolahan Rumput Laut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021;
- Telah dilaksanakan *knowledge sharing* sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada tanggal 18 Maret tahun 2024 di Aula BPPMHKP Makassar Jalan Dakota No. 24 Sudiang dengan salah satu materinya adalah surveilan dan pengambilan sampel dalam rangka *official control*.

Rekomendasi rencana aksi

Peningkatan kepatuhan Inspektur Mutu dalam hal penyelesaian administrasi melalui pembinaan dan pemantauan secara intensif.

Adapun Rincian Nama-nama Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut yang telah terealisasi pada Triwulan I 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama UPI/UPRL	Alamat
1.	Kospermindo Koperasi	Jl. Kima 8 Kav. 3A1 Makassar South Sulawesi - Indonesia
2.	CV. Adiwandi Hanania Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 1 Gudang Blok 1, Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
3.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi -Indonesia
4.	PT. Armita Laut Nusantara	Jl. Tarakan Lr 155 No. 14, Kel. Malimongan Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
5.	PT. Blue Ocean Resources	Jl. Kompleks Perhubungan No. 5, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi Indonesia
6.	PT. Celebes Berkah Niaga	Pergudangan Pelitagro Blok A No.15, Jl. Ir. Sutami No 24, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	CV. Faris Indo Seafood	Pattene Business Park Blok K No. 2, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

8.	CV. Guna Bahari Indonesia	Pergudangan Patene 88 Blok N No.1, Jl. Business Park, Ds.Pabentengan, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
9.	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Jl. Lantebung No. 99 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No. 1 Gudang A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
11.	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinranae No.1 Bulu-Bulu, Kelurahan Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
12.	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. KIMA Raya I Kav. D-1B Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya 1 Blok D-2B Kawasan Industri Makassar
14.	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima III Kav. 5AB, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
16.	PT. Sumber Gratia Mandiri	Pergudangan Pattene Business Park Blok B No. 8-9, Desa Pa'bentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
17.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
18.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Ujungpandang Baru No. 17 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
19.	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jalan Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
20.	PT. Perikanan Indonesia (Persero) Cabang Makassar	Jl.Sabutung I No.1, Kelurahan Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
21.	PT. Piala Laut Indonesia	Jl. Kima 17 Kav. DD9 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
22.	PT. South Suco	Jl. KIMA VI Blok G - 4, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
23.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10 Kav. C - 3A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
24.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10T - 2B, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
25.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

26.	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4-B1 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
27.	CV. Gembira Galesong	Jl. Abdul Kadir, Desa Galesong Kota, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
28.	PT. Giwang Citra Laut	Jln. Poros Pabrik Gula Takalar KM.1,5 Desa Parappunganta,Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
29.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
30.	PT. Sumber Lautan Nusantara	Jl. Lantebung No. 168, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
31.	PT. Inti Mulia Cahaya	Jln. Pelabuhan Paotere Makassar, South Sulawesi - Indonesia
32.	CV. Mitra Alam	Jl. Lantebung No. 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
33.	PT. Asia Sejahtera Mina (Sutami)	Jl. Ir. Sutami No. 24 Blok A1 Kawasan Logistik Terpadu, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
34.	PT. Kawa Gutti	Jl. Ir. Sutami (Tol Lama) No. 22 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
35.	PT. Flying Fish Algae	Jl. Ir. Sutami No. 19, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
36.	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59, Tallo Lama Makassar, South Sulawesi - Indonesia
37.	CV. Asryl Perkasa	Perumahan Citra Sanggalea Indah, Blok D4 No. 4,Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
38.	PT. Niaga Adijaya Mandiri	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
39.	CV. Buana Laut Nusantara	Jl. Kima VI Kav. F.1 B1, Kota Makassar, 90243, South Sulawesi - Indonesia
40.	PT. Global Maju Pratama	Pattene Business Park Blok H No. 2, Desa Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
41.	CV. Reski Bahari	Jl. Poros Makassar Maros Km. 24 Ballu - Ballu Maros, South Sulawesi - Indonesia
42.	PT. Bantimurung Indah	Desa Allepolea, Jl. Raya Maros, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

43.	PT. Asia Sejahtera Mina	Pergudangan 88 Pattene Biz Park R-30, Kel. Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
44.	PT. Bintang Megah Jaya Perkasa	Jl. Poros Maros No. 50 Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
45.	PT. Tujuh Samudra Jaya	Jl. Malino Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Gowa, South Sulawesi - Indonesia
46.	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima 8 Kav. SS No. 23A Kawasan Industri Makassar, Kel. Birra, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
47.	CV. Anugerah Jaya Fishery	Jl. Poros Maros, Ruko Graha Cemerlang Blok C No. 10-11, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
48.	CV. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2 - 10 Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
49.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV KAV. P-3A, KIMA Makassar, South Sulawesi - Indonesia
50.	PT. Biota Laut Ganggang	Jl. Kebangkitan No.8, Dusun Belabelawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, South Sulawesi - Indonesia
51.	PT. Bumi Menara Internusa	Jl. Kima 15 Kavling R No.4C, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
52.	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng Batu - Batu, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi - Indonesia
53.	PT. Rahmat Bahari Indonesia	Jl. Kima 14 No. F2 SS3 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
54.	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdulah Raya Lorong 3 No. 9 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
55.	PT. Jaya Utama Quality	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
56.	PT. Sutraco Nusantara Mega	Pattene 88 Cluster Green Park Blok C No. 18 & 20 Maros, South Sulawesi - Indonesia
57.	PT. Guna Bahari Indonesia (Parangloe)	Pergudangan Parangloe Indah Blok I - 1 No. 3 Jl. Ir. Sutami, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
58.	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Jl. Kima 6, Kav F3/B1-B2, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
59.	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4B Makassar South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

60.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
61.	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K-9/Kav.B2 Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
62.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD No. 15 - 16 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
63.	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
64.	PT. Karisa Timur Indonesia	Jl. Pattene Raya Ruko Noni No. 3 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
65.	CV. Najwa Bahari	Jl. Sabutung Baru III No. 25 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
66.	CV. Alga Marina Sukses	Jl. Ir. Sutami 107, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
67.	CV. Anugerah Lin Perkasa	Jl. Kima No. 20 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
68.	CV. Karya Murni	Kampung Parang Dusun Jonggo Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
69.	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G8, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
70.	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No. 42 Km. 147 Bojo Barru Kec. Mallusetasi, Barru, South Sulawesi - Indonesia
71.	PT. Dwira Masagena	Jl. Kima Raya 1 Kav. B5, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
72.	CV. Karya Nelayan	Ruko Graha Cemerlang Blok E No. 16-17 Poros Makassar- Maros Km 21, Kelurahan Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
73.	PT. Anugrah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
74.	PT. Manara Atha Samudra	Jl. Kima 10 Kav T-3 A, Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

75.	PT. Bahari Makmur Sejati	Jl. KIMA 16 Kav BB No. 4 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
76.	PT. Cahaya Cemerlang	Jl. Ir Sutami 22, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
77.	PT. Rahmat Bahari	Jl. Poros Pattene, Kompleks Pergudangan Pattene Busines Park, Blok H No. 1 Kel. Temmappaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
78.	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Pendidikan No. 8, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
79.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
80.	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar - Pangkep) Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros South Sulawesi - Indonesia
81.	PT. Asnur Anton Jaya	Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
82.	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
83.	PT. Maa Ataita Indah	Jl. Kapasa Raya No.29 B, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
84.	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. KIMA 15 Kav. R4D-R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
85.	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Hombes, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, South Sulawesi-Indonesia
86.	UD. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3 NO.10, Komp. Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
87.	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No. 3A Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
88.	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jln. Sabutung No. 3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
89.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Business Park Blok U 3B, Maros, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

90.	CV. Lintas Samudera Mandiri	Kompleks PPI Lonrae Kav. 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, South Sulawesi - Indonesia
91.	PT. Nusadwipa Citra Tunggal	Jl. Kima 7 Blok J No. 4A, Makassar, South Sulawesi - Indonesia

Dokumentasi kegiatan surveilen dan pengambilan sampeldi Unit Pengolahan Ikan dalam rangka *Official Control*



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1 Lokasi usaha yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	-	-	-	4	2	18	0	0	0	0	-	-

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan membuahkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan sampah plastik di laut.

Quality Assurance sesuai Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 yaitu kegiatan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. BKIPM selaku otoritas kompeten mendapat mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

penerapan pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tahun 2024 Verifikasi Quality Assurance terhadap produksi hulu-hilir berdasarkan manual IKU BKIPM, formula IKU diukur dengan menghitung jumlah lokasi yang telah dilakukan yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Adapun lokasi kegiatan Verifikasi QA tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2023 tentang Lokasi Kampung Nelayan Maju sebanyak 4 (empat) lokasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya sebanyak 14 (empat belas)

Lokasi Kampung Nelayan Maju :

1. Pontap Desa/Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur , Kabupaten/Kota Palopo
2. Bonto Lebang, Desa/Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng
3. Mattirotasi, Desa/Kelurahan Matirotasi, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang
4. Lonrae, Desa/Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone

- Lokasi Kampung Perikanan Budidaya :

1. Rumput laut, Kabupaten Bantaeng,
2. Bandeng, Kabupaten Bone
3. Rumput laut, Kabupaten Luwu
4. Bandeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Windu, Kabupaten Pinrang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

6. Rumput laut, Kabupaten Takalar
7. Rumput laut, Kabupaten Wajo
8. Mas, Kabupaten Toraja Utara
9. Nila, Kabupaten Bulukumba
10. Nila, Kabupaten Enrekang
11. Nila, Kabupaten Gowa
12. Rumput laut, Kabupaten Maros
13. Nila, Kabupaten Sinjai
14. Nila, Kabupaten Soppeng

Pada triwulan I tahun 2024, kegiatan Verifikasi QA terhadap produk perikanan hulu – hilir di Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya dengan 18 (delapan belas) lokasi belum dilaksanakan karena adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA).

Jika dibandingkan dengan target capaian IKU di Tahun 2023 yaitu 2 lokasi kampung perikanan budidaya, maka di Tahun 2024 terdapat penambahan 16 lokasi kegiatan. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan Quality Assurance terdiri dari inspektur Mutu Ahli Madya, Inspektur Mutu Ahli Muda, Asisten Inspektur Mutu dan dukungan manajerial. Personil yang terlibat pada kegiatan Tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023 di sebabkan karena adanya reorganisasi

Kegiatan pendukung

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	3990.PBR.001 Penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM dalam rangka Quality Assurance produk hasil perikanan	90.000.000	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2.	3990.PDD.001 Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing	65.000.000	-
3.	3990.PDD.002 Penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi (ISO 17020) untuk mendukung BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan	25.000.000	-
4.	3990.QIA.001 Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance pada proses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP)	179.580.000	-

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024 bersumber pada kegiatan usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi dengan total anggaran sebesar Rp. 199.000,000, Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 28.000.000 terdapat kenaikan yang cukup signifikan atau sebesar 85,93%.

Akar permasalahan

Waktu pelaksanaan kegiatan Verifikasi QA Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya tidak dapat dilaksanakan di sebabkan adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi Automatic Adjustment (AA).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pada Januari 2024 telah menyelesaikan laporan kegiatan verifikasi Quality Assurance TW IV 2023
- Membuat Surat Tugas tim pelaksana kegiatan verifikasi Quality Assurance tahun 2024

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan koordinasi dengan Tim verifikasi QA Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.



Tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM, untuk mencapai sasaran strategis ini diperlukan dukungan 8 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 8 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	
1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	1. 84 Indeks
2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar	2. 82 Nilai
3. Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	4. 80 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	5. 93,76 Nilai
6. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	6. 82 Nilai
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	7. 80 Nilai
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup lingkup Balai Besar KIPM Makassar	8. 80 Nilai

IK8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHPK	1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	68,01	81,44	82,23	90,27	84	0	0	0	0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah Pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh seorang ASN dengan Nilai maksimal bobot 25.

Nilai Pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan Jenjang Jabatan :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	23	20	15	10	5

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Kompetensi adalah Pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan seminar dengan Nilai bobot 40.

Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- **Komponen Diklat Fungsional** diambil dari data kursus dengan tipe kursus “**Diklat Fungsional**”. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun.
- **Komponen Diklat 20JP** diambil dari data kursus dengan tipe “**Diklat Fungsional atau Diklat Teknis**” yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. **Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung** apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP.
- **Komponen Seminar** diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Keltural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- a. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
- b. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- c. Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5
3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30
- Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :
- a. Nilai 30 (sangat baik)
 - b. Nilai 25 (baik)
 - c. Nilai 20 (butuh perbaikan)
 - d. Nilai 15 (kurang)
 - e. Nilai 10 (sangat kurang)

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5
- Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplini sebagai berikut :
- a. Tidak Pernah 5
 - b. Ringan 3
 - c. Sedang 2

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

d. Berat 1

- Target Tahunan IP ASN 2024 adalah 84 IP

Semester I : 81

Semester II : 84

- Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3	:	= 0 pegawai x 25	= 0
2. S2	: - Jabatan Pimpinan Pratama	= 1 pegawai x 23	= 23
	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 14 pegawai x 23	= <u>322</u>
			<u>345</u>
3. S1	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 38 pegawai x 20	= 760
	: - Jabatan Pengawas	= 1 pegawai x 21	= 21
	: - Jabatan Pelaksana	= 9 pegawai x 22	= 198
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 3 pegawai x 22	= <u>66</u>
			<u>1.045</u>
4. D3	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 10 pegawai x 21	= <u>210</u>
			<u>210</u>
5. SMA	: - Jabatan Pelaksana	= 13 pegawai x 20	= 260
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 4 pegawai x 20	= <u>80</u>
			<u>340</u>
			<u>1.940</u>
Jumlah Total			<u>1.940</u>

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.940}{93} = 20,86$$

Jadi pada Triwulan I diperoleh nilai rata-rata Kualifikasi Pendidikan **20,86**

Jadi triwulan I nilai kualifikasi pendidikan sebesar 20,86 ini berarti nilai kualifikasi pendidikan sama dengan nilai kualifikasi pendidikan untuk nilai kualifikasi pendidikan tahunan 2023.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

- 76 pegawai ASN mendapat nilai 25 = 76 x 25 = 1.900
 - 13 pegawai ASN mendapat nilai 17,5 = 13 x 17,5 = 227,5
 - 3 pegawai ASN mendapat nilai 15 = 3 x 15 = 45
 - 1 pegawai ASN mendapat nilai 10 = 1 x 10 = 10
- Jumlah 2.182,5

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{2.182,5}{93} = 23,47$$

Jadi pada triwulan I diperoleh nilai rata-rata Kompetensi ASN sebesar **23,47**

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada Triwulan I nilai Kompetensi ASN sebesar 23,47 ini berarti ada penurunan sebesar 16,53 karena pada nilai kompetensi tahunan 2023 memperoleh nilai 40.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 26 orang ASN memperoleh nilai PPKP dengan predikat Baik sehingga mendapat bobot nilai 25 = $26 \times 25 = \underline{650}$
- 67 orang ASN tidak dinilai = 0

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{650}{93} = 6,99$$

Jadi pada Triwulan I 2024 diperoleh nilai rata-rata Kinerja **6,99**

Pada Triwulan I nilai Kinerja sebesar 6,99 ini berarti ada penurunan Nilai kinerja sebesar 17,42 dibanding nilai kinerja tahunan 2023 dimana nilai kinerja tahunan 2023 sebelumnya sebesar 24,41.

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 93 orang ASN mendapat nilai 5 = 465

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{465}{93} = 5$$

Jadi pada Triwulan I 2024 diperoleh nilai rata-rata Disiplin 5

Pada Triwulan I nilai disiplin sebesar 5 ini berarti tidak ada perubahan pada nilai disiplin untuk nilai tahunan 2023 sebelumnya.

- ***Pencapaian untuk Triwulan I Tahun 2024 nilai capaian sebesar 56,32 indeks profesioniltas (IP) yaitu :***

1. Kualifikasi pendidikan = 20,86 IP
2. Kompetensi = 23,47 IP
3. Kinerja = 6,98 IP
4. Disiplin = 5 IP

- **Nilai Realisasi IP ASN = Kualifikasi Pendidikan + Kompetensi + Kinerja + Disiplin**
= 20,86 + 23,47 + 6,99 + 5
= 56,32

Untuk mengetahui dalam bentuk presentasi (%) Capaian IP ASN yaitu :

$$\text{Presentase (\%)} \text{ Capaian IP ASN} = \frac{\text{Nilai Realisasi IP ASN}}{\text{Target Tahunan IP ASN}} \times 100 \%$$

$$\text{Presentase (\%)} \text{ Capaian IP ASN} = \frac{56,32}{84} \times 100 \%$$

$$= 67,04 \%$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Untuk tahun 2024 ini target IP ASN adalah target semesteran namun sebagai acuan diperlukan perbandingan nilai capaian realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2023 untuk sebagai bahan perbandingan yaitu :

- Realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2024 = 56,32
- Realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2023 = 75,99

Ini berarti terjadi penurunan realisasi sebesar 19,67 IP untuk Triwulan I tahun 2024 dibanding Triwulan I Tahun 2023

Untuk Pegawai ASN yang terlibat dalam pencapaian target pada Triwulan I tahun 2024 sebanyak 93 orang, terdiri dari :

- Kepala 1 orang,
 - Kepala Sub Bagian Umum 1 orang
 - pengelolaan Keuangan APBN 3 orang
 - Inspektur Mutu Hasil Perikanan 26 orang
 - PHPI 45 orang
 - Analisis Kepegawaian 1 orang
 - Arsiparis 1 orang
 - Pranata Komputer 1 orang
 - Fungsional Umum 14 orang
- Pada triwulan I terjadi mutasi alih tugas fungsional PHPI dari Balai Besar KIPM Makassar ke Balai Besar Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Sebanyak 60 orang pegawai yang disebabkan oleh transformasi kelembagaan,

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

dan 1 orang pegawai memasuki masa purnabakti hal itu menyebabkan pegawai BBKIPM Makassar menjadi 32 orang Pegawai.

- SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum, dan pengelola kepegawaian terdiri dari Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan.

- **Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.925.000,- terdiri dari anggaran:**
 1. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Peningkatan kompetensi SDM sebesar Rp. 12.000.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-
 2. Refreshmen panelis organoleptic sebesar Rp. 3.560.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-
 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebesar Rp. 21.851.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 3.600.000,-
 4. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp. 36.514.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-

Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website www.ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar masalah

- Belum dilakukannya update data pegawai untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan dimana seluruh penilaian kinerja pegawai yang mutasi sudah tidak ternilai lagi di Balai Besar KIPM Makassar.
- Belum adanya pegawai yang memenuhi diklat 20 JP untuk penilaian kompetensi pegawai

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan rekapitulasi sertifikat pelatihan pegawai secara berkala
- Menyampaikan kepada pegawai untuk mengupdate data diklat/ pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id
- Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada myasn.bkn.go.id
- Telah dilaksanakan briefing pagi pada tanggal 26 Januari 2024 yang salah satu substansi penyampaiannya adalah menghimbau pegawai untuk memenuhi bukti dukung prestasi kinerja pegawai.

Rekomendasi rencana aksi

- Melakukan update data untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan
- Menyampaikan kepada pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan/seminar/ webinar, diklat dan pengembangan kompetensi lainnya terutama untuk kegiatan diklat yang memiliki Jam Pembelajaran 20 JP dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
			1	SEKRETARIAT BAGIAN KABARSTRATA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL POKBANGKAS	73	21,22	84,88 %	15,8	39 %	17,12		
2	PUSAT KABARSTRATA HARU	42	21,83	87,32 %	37,55	51,88 %	1,79	5,97 %	4,81	96,2 %	49,88	SANGAT RENDAH
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	32	21,03	84,12 %	14,92	37,3 %	11,09	36,97 %	4,91	98,2 %	51,99	SANGAT RENDAH
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KERTULAHAN	34	21,5	86 %	18,18	47,88 %	5,76	19,2 %	4,91	98,2 %	51,76	SANGAT RENDAH
5	BALAI BESAR KIPM JAKABATI	21	20,9	65,8 %	21,07	52,88 %	14,28	47,63 %	5	100 %	61,26	RENDAH
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	93	20,88	83,44 %	23,47	58,67 %	6,88	23,3 %	5	100 %	56,32	SANGAT RENDAH
7	BALAI KIPM DEKASAR	48	21,18	84,72 %	18,34	46,33 %	5,1	17 %	5	100 %	50,62	SANGAT RENDAH

IK 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
		Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHPK	1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	91,93	88	95,3	87,13	82	0	0	0	0

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2020-2024, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Untuk dokumen Renja masih dalam proses perbaikan

Dengan demikian capaian parameter ini adalah sebesar 22,5 %

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa:

Penyusunan Manual IKU tahun 2024 serta pengesahannya telah dipenuhi sehingga nilai parameter ini mencapai bobot 30 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada triwulan I telah dilakukan pengumpulan data dan verifikasi kesesuaian data dukung capaian kinerja.

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

- Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perhitungan tahunan.

- **Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.498.000,- yang terdiri dari**

a. Layanan Hubungan masyarakat sebesar Rp 12.470.000,-

b. Layanan data dan informasi sebesar Rp 14.028.000,-

Sampai dengan triwulan I teralisasi anggaran sebesar Rp 900.000 atau 7,22 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Jika dibandingkan pada tahun 2023 pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 16.400.000,-, mengalami kenaikan anggaran sebesar 61,57%.
- Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2023 yang sebesar 49,78%, maka mengalami penurunan realisasi sebesar 42,56 %.
- Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Muda, Staf Pengelola Anggaran(Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Keuangan, Analis Laporan BMN)

Akar masalah

- Capaian perencanaan belum optimal disebabkan Renja masih dalam proses perbaikan
- Adanya potensi keterlambatan penyelesaian laporan kinerja dari setiap kegiatan untuk triwulan I tahun 2024
- Penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan laporan kinerja tahunan 2023 melalui aplikasi ESR Kemenpan RB
- Telah dilakukan dialog kinerja tanggal 2 Februari 2024 dimana salah satu substansi penyampaian materi adalah dokumen penetapan kinerja tahun 2024, selain itu juga dibahas strategi, risiko dan rencana aksi organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja .

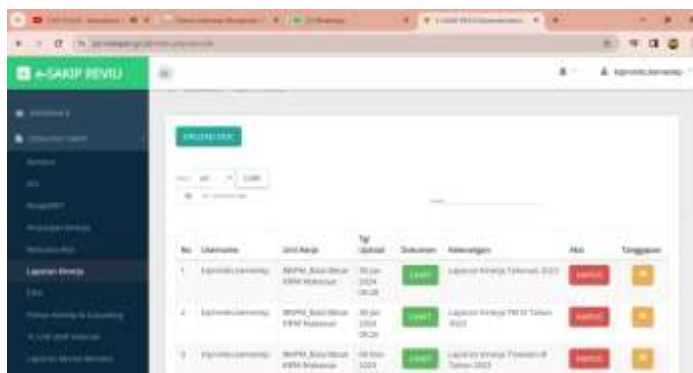
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan laporan kinerja tahunan 2023 melalui aplikasi ESR Kemenpan RB
- Telah dilakukan dialog kinerja tanggal 2 Februari 2024 dimana salah satu substansi penyampaian materi adalah dokumen penetapa kinerja tahun 2024, selain itu juga dibahas strategi, risiko dan rencana aksi organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja .

Rekomendasi rencana aksi

Penanggungjawab kegiatan melaporkan hasil capaian kegiatan tepat waktu



No.	Uraian	Unit Kerja	Tgl.截止	Status	Alokasi	Aksi	Tanggapan
1	Agenda Kinerja	BPM, Balaikota KPM Makassar	30 Jan 2024 08:00	Selesai	Agenda Kinerja Tahun 2024	Selesai	
2	Agenda Kinerja	BPM, Balaikota KPM Makassar	30 Jan 2024 08:00	Selesai	Agenda Kinerja TMT Tahun 2024	Selesai	
3	Agenda Kinerja	BPM, Balaikota KPM Makassar	30 Jan 2024 08:00	Selesai	Agenda Kinerja PPKM Tahun 2024	Selesai	

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	1	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi

perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2023;

Pada triwulan I tahun 2024 tidak diterima temuan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan secara formal, sehingga capaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2023 tidak terjadi perubahan pencapaian, yakni sama 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 11.644.000,- yang terdiri dari :

- Belanja bahan penggandaan dan pelaporan Rp. 8.044.000,-;
- Alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 3.600.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan anggaran Rp. 2.027.500,- atau 17,41% yang digunakan untuk penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 985.500,-;

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu total Rp. 16.400.000,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 7.999.584 atau 48,78%. Terjadi penurunan realisasi sebesar 31,37% pada periode yang sama;

Akar masalah

Pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Tindakan yang telah dilaksanakan

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pembayaran adalah telah dilakukan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah di-PDF-kan secara berkala;

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Rekomendasi rencana aksi

Meningkatkan pemahaman dan kecermatan verifikator keuangan dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja dengan *briefing* dan pengarahan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran;



Dokumentasi kegiatan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan

IK 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	82	65	100	100	80	80	100	125	125,0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

ΣN_t = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan I tahun 2024 tidak terdapat audit kinerja dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%, sama seperti pada periode triwulan I tahun 2023 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP sehingga nilai capaian kinerja adalah sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2023, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.646.063.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.140.880.553,- atau 21,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Sedangkan pada tahun 2023 alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,- yang berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 dari pagu Rp. 16.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.999.584,- atau 48,78%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan SDM dalam mendukung Indikator Kinerja ini.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Akar permasalahan

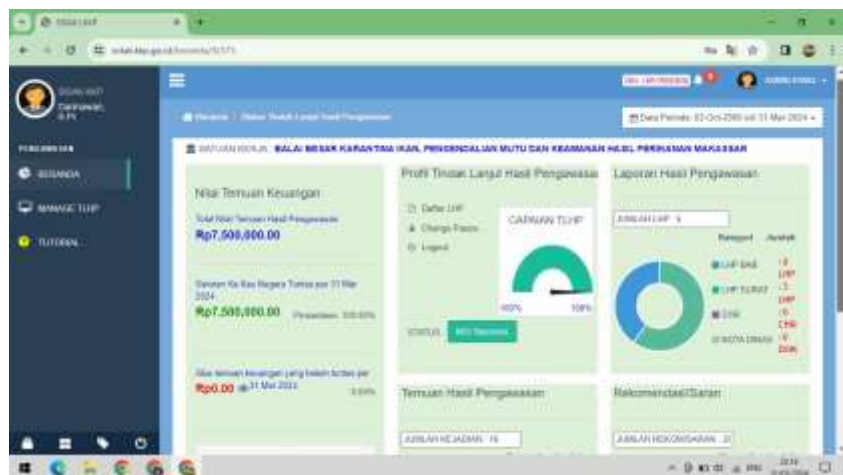
Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;
2. Telah dilaksanakan briefing kepada tim pengelola kegiatan dan anggaran pada tanggal 26 Januari 2024, dengan substansi briefing salah satunya adalah pengelolaan kegiatan dan anggaran dan pemantauan hasil audit oleh itjen KKP.

Rekomendasi rencana aksi

Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	1 Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	88	89	98,44	96,38	93,76	93,76	74,91	79,89	79,89	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup :

1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper;
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (5%)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 - a. Capaian Output (25%)

Capaian nilai IKPA pada triwulan I tahun 2024 sebesar 74,91 atau 79,89% dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan tidak melebihi batas maksimal dalam satu tri wulan, nilai 100
- Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan, untuk rata- rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN dengan rata- rata deviasi kumulatif sampai Maret 2024 sebesar 0 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

$$100 - \text{rata rata deviasi kumulatif} = 100 - 0 = 100$$

Nilai rata-rata deviasi kumulatif tri wulan I diperoleh 100

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan dengan nilai 100

$$\begin{aligned} PA &= \frac{\text{Penyerapan}}{\text{Target Penyerapan}} \times 100 \\ PA &= \frac{3.709.998.035}{3.709.998,035} \times 100 \\ PA &= 100 \end{aligned}$$

- Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :
Ketepatan waktu, semua data kontrak disampaikan tepat waktu (bobot 40%): $100 \times 40\% = 40$
akselerasi kontrak dini, terdapat kontrak pada triwulan I

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

(bobot 30%):100 x 30%	= 30
akselerasi kontrak belanja modal, belanja modal belum dikontrakkan pada tri wulan I (bobot 30%): 100 x 30%	= 30
Jumlah	= 100

- Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Seluruh SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN tidak melebihi batas waktu, dengan nilai 100;

- Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

ketepatan waktu (bobot 50%):100 x 50%	= 50
persentase GUP (bobot 25%): 96,28 x 25%	= 24,07
setoran TUP (bobot 25%) : 100 x25%	= 25
Jumlah	= 99,07

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan I :

Tidak ada dispensasi SPM :100

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

- Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

ketepatan waktu, penyampaian data capaian output tepat waktu

(bobot 30%) : 0 x 30%	= 0
capaian RO, seluruh RO capaiannya mencapai 0%	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

(bobot 70%) : 0 x 70% = 0
 Jumlah = 0
 Pengukuran belum dapat dilakukan karena Kementerian Keuangan belum menyediakan fasilitas penginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI;

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai 74,91 dengan rincian sebagai berikut

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
Nilai	100	100	100	100	100	99,07	100	0	74,91
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	10	10	20	10	10	9,91	5	0	
Nilai Aspek	100		99,81					0	

Realisasi Indikator kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 74,91 dari target tahunan sebesar 93,76 atau tingkat capaian kinerja 79,89%.

Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 yang tingkat capaian kerjanya sebesar 107,58% mengalami penurunan sebesar 27,69%. Penurunan capaian ini karena pada periode triwulan I tahun 2024 komponen capaian output belum dapat diukur capaiannya (aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan belum siap digunakan).

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran T.A 2024 sebesar Rp.10.632.000,- digunakan untuk layanan manajemen keuangan. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.15.600.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.4.968.000,-.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.5.076.000,- atau 47,74% yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor dan suplis computer sebesar Rp.5.035.000,- dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.41.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar 10,83%, maka terjadi kenaikan sebesar 36,81%.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN.

Akar masalah

Capaian Output pada aplikasi SAKTI belum dapat diinput disebabkan aplikasinya sedang dalam tahap pengembangan pada menu capaian output;

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pada tanggal 26 Januari 2024 dilaksanakan briefing pagi yang salah satu substansi penyampaiannya adalah operasional capaian IKPA

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Rekomendasi rencana aksi

Melakukan komunikasi dengan KPPN Mitra dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.



No	Kategori Anggaran	Indikator	Rencana Anggaran		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran		
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	1 Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar			86	87,87	86,2	82	0	0	0	0,0	-	-

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi kinerja anggaran regular dan evaluasi kinerja anggaran non-regular. Evaluasi kinerja anggaran regular dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan evaluasi kinerja anggaran non regular dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi kinerja anggaran regular terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja, Evaluasi kinerja anggaran atas

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

aspek manfaat dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat Kementerian /Lembaga dan tingkat unit eselon 1 dan Evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat Kementerian /Lembaga dan tingkat unit eselon 1. Balai Besar KIPM Makassar menggunakan pengukuran kinerja anggaran menggunakan Aspek implementasi.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dengan mengukur variabel-variabel

Penyerapan Anggaran, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output dan efisiensi.

- Penyerapan Anggaran : diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir
- Konsistensi : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan
- Capaian Output : Capaian output untuk satker pada aspek implementasi adalah capaian RO yang diukur dengan membandingkan antara RVRO dengan TVRO
- Efisiensi : efisiensi untuk satker adalah Efisiensi RO dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran Seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan dan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian RO. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi RO adalah Capaian RO, Pagu dalam DIPA terakhir, realisasi anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi terdiri atas:

- penyerapan anggaran sebesar 9,7% (Sembilan koma tujuh persen).
- konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times WE)$$

NK	: Nilai Kinerja aspek implementasi
P	: dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker
Wp	: Bobot Penyerapan Anggaran = 9,7 %)
K	: Antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruhnya satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulanan
Wk	: Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi = 18,2 %)
PK	: dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target indikator kinerja keluaran
Wpk	: Bobot Pencapaian Keluaran = 43,5 %)
E	: dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran
WE	: Bobot Efisiensi =28,6 %)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Variabel Penyerapan Anggaran		
Triwulan I Tahun 2024		
Periode	RPD Bulanan (RA)	Realisasi Anggaran (AA)
1	1.138.415.801	1.138.416.600
2	1.320.060.151	1.346.936.851
3	1.334.173.044	1.224.644.584
4	882.570.916	
5	932.369.413	
6	1.523.606.658	
7	932.863.404	
8	792.766.061	
9	969.218.521	
10	1.199.729.993	
11	732.630.926	
12	602.285.112	
Jumlah	12.360.690.000	3.709.998.035
	Penyerapan	30

Nilai Kinerja Anggaran untuk aspek implementasi pada variable Penyerapan adalah sebagai berikut:

$$P \times Wp = 30 \times 9,7\%$$

$$NK = 2,91$$

2. Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

RAKn : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n
 RPDKn : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ken
 n : jumlah bulan

Variabel Konsistensi			
Triwulan I Tahun 2024			
Periode	RPD	Realisasi Anggaran	Konsistensi Bulanan
1	1.138.415.801	1.138.416.600	100
2	1.320.060.151	1.346.936.851	102
3	1.334.173.044	1.224.644.584	92
4	882.570.916		0
5	932.369.413		0
6	1.523.606.658		0
7	932.863.404		0
8	792.766.061		0
9	969.218.521		0
10	1.199.729.993		0
11	732.630.926		0
12	602.285.112		0
Jumlah	12.360.690.000	3.709.998.035	294
Total Konsistensi Bulanan			98

Berdasarkan tabel diatas diperoleh Konsistensi sebesar 98 sehingga nilai kinerja pada aspek implementasi konsistensi adalah:

$$K \times Wk = 98 \times 18,2\%$$

$$NK = 17,84$$

Untuk Aspek pengukuran capaian realisasi output dan nilai efisiensi belum bisa dilaporkan pada triwulan I Tahun 2024 karena belum adanya himbauan dari kementerian keuangan terkait penginputan realisasi capaian output pada Aplikasi SAKTI 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Dari empat aspek tersebut diperoleh nilai kinerja pada triwulan I tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Aspek	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Penyerapan	30	9,7%	2,91
Konsistensi	98	18,2%	17,84
Capaian Realisasi Output	-	43,5%	-
Nilai Efisiensi	-	28,6%	-
Jumlah			20,75

Sebagai bahan perbandingan capaian nilai kinerja anggaran untuk triwulan I 2024 dan triwulan I 2024

Aspek Implementasi	Bobot	Triwulan I 2024		Triwulan I 2023	
		Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir
Penyerapan	9,70%	30	2,91	17,54	1,7
Konsistensi	18,20%	98	17,84	101	18,5
Capaian realisasi output	43,50%	0	0,00	6,65	2,89
Efisiensi	28,60%	0	0,00	67,09	19,19
Nilai Kinerja Anggaran			20,75		42,28

Berdasarkan tabel perbandingan capaian nilai kinerja anggaran untuk triwulan I 2024 dan triwulan I 2023 terjadi penurunan nilai sebesar 21,53 persen. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut adalah karena masih kosongnya nilai kinerja pada aspek

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

capaian realisasi output dan efisiensi yang menjadi bagian dari variabel IKU Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi penyerapan untuk triwulan I tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023

Aspek Implementasi	Triwulan I 2024 (%)	Triwulan I 2023 (%)	Perbandingan (%)
Penyerapan	2,91	1,7	↑ 1,21
Konsistensi	17,84	18,5	↓ 0,66
Capaian Realisasi Output	0	2,89	↓ 100
Nilai Efisiensi	0	19,19	↓ 100

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp71.621.000, sampai dengan triwulan I 2024 telah terealisasi sebesar Rp52.691.384 atau 73,57% yang digunakan untuk

- Rapat kerja teknis BKIPM
- Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan

Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 40,39 % dari triwulan I 2024 jika dibandingkan triwulan I 2023. Peningkatan realisasi ini disebabkan karena Pagu anggaran tahun 2024 lebih kecil dibanding pagu anggaran tahun 2023 sehingga serapan realisasi lebih cepat.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

Akar masalah

Potensi masalah yang terjadi karena blm adanya himbauan dari kementerian keuangan untuk melakukan penginputan capaian output yang merupakan salah satu

LAPORAN KINERJA

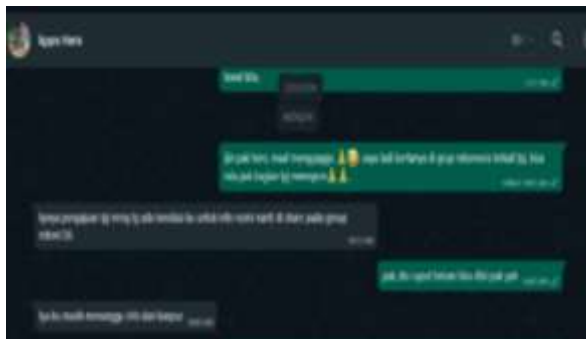
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

variabel dalam perhitungan NKA(Aplikasi belum siap) sehingga perhitungan NKA pada satker Balai Besar KIPM Makassar masih dalam proses.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menindaklanjuti rekomendasi triwulan IV 2023 operator smart dja telah melakukan komunikasi dengan petugas KPPN Makassar II terkait pelatihan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI namun pada triwulan I 2024 baru dapat dilaksanakan pelatihan implementasi aplikasi MonSAKTI (BMN, Persediaan, dan GLP) .



Tangkapan layar komunikasi operator SMART DJA dengan Petugas KPPN Makassar II (136)

Rekomendasi rencana aksi

- Peningkatan kompetensi Operator SMART melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/HKP	1 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar				79,56	78,26	80	0	0	0	0	-	-

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing. Perlunya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksanaanya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %).

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur: sebagai berikut :

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Paket Penyedia sebanyak 4 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 28.604.000,-
 - b. Paket Swakelola sebanyak 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.481.619.000,-
 - c. Paket Penyedia dalam swakelola sebanyak 78 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.513.259.000,-

Realisasi rencana umum pengadaan = 20%;

Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti rapat Evaluasi RUP dan Rapat Validasi pada TW I Tahun 2024 dengan waktu dan lokasi sebagai berikut:

- a. Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024 Pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.15 Wita sampai 13.00 Wita, bertempat di kantor

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Stasiun KIPM Yogyakarta diikuti secara virtual meeting. Tujuan kegiatan adalah Evaluasi RUP dan tersusunnya RUP tahun 2024 lingkup BPPMHKP Tahun 2024. Kegiatan evaluasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BPPMHKP

- b. Validasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024 Pada tanggal 13 Maret 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti rapat Validasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tujuan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pengelolaan serta tersusunnya RUP lingkup KKP Tahun 2024 yang telah divalidasi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Tim Kerja/ Koordinator Layanan Pengadaan Biro Umum dan PBJ, Setjen KKP dan pada kesempatan tersebut Balai Besar KIPM Makassar dinyatakan tuntas Pada TW I Tahun 2024 Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP terealisasi 20% dan pada TW I 2023 Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP terealisasi 20% dengan demikian perbandingan presentase realisasi TW I Tahun 2024 dengan TW I Tahun 2023 ada sama 20%.
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%) Pada Tahun Anggaran 2024 tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan belanja modal, sehingga pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE tidak mungkin dilaksanakan. Dengan demikian, untuk menyederhanakan perhitungan unsur ini diberikan bobot nilai 30 %
3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa perlu dilakukan pencatatan dan penginputan data laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (0 %)

Pada TW I Tahun 2024 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa masih 0% dan pada TW I 2023 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa masih 0% dengan demikian perbandingan presentase realisasi TW I Tahun 2024 dengan TW I Tahun 2023 ada sama 0%.

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada triwulan I 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Baran

Tabel progres kegiatan pengadaan barang/ jasa secara E-Purchasing, pagu, realisasi anggaran dan bobot persentase melalui SPSE pada TW I Tahun 2024 sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Pagu (Rp.)	Realisasi (Paket)	% (Paket)	Realisasi (Rp.)	% (Rp.)
1	E-Purchasing	18	182.017.000,-	6	33,33	10.803.500,-	5,94

Rincian Realisasi kegiatan dan anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/EPurchasing pada TW I adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan layanan manajemen keuangan sebesar Rp. 4.515.000,-
2. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan evaluasi dan pelaporan sebesar Rp. 985.500,-
3. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan sebesar Rp. 1.574.000,-
4. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan sertifikasi CPIB pada suplier sebesar Rp. 1.827.000,-
5. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan surveilan sebesar Rp. 885.000,-
6. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan sebesar Rp. 1.017.000,-

Realisasi adalah $5,94\% / 30\% \times 100\% = 19,8\%$

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini adalah $= 20\% + 30\% + 19,8\% = 69,8\%$ dari target 80 % sehingga tingkat capaiannya sebesar $(69,8\% / 80\%) \times 100\% = 87,25\%$.

Pada TW I 2024 persentase IKU ini terealisasi sebesar 69,8%, jika dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada TW I 2023 yaitu sebesar 50% maka terjadi peningkatan sebesar 19,8%

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 8 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul BMN).

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 214.456.000,- Yang terdiri dari :

1. **3987.EBA.994 02.** Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 43.546.000,-
2. **3987.EBA.994 02.** Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pas Pelabuhan Laut/ Udara = Rp. 42.000.000,-
3. **3987.EBA.994 02.** Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu = Rp. 84.000.000,-

Adapun realisasi anggaran mendukung IKU ini sebagai berikut : Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 23.787.983,- atau 11,09 % berupa :

- 1.1 Pas Pelabuhan Laut/ Udara = Rp. 42.000.000,-

Realisasi pengadaan pas pelabuhan laut/ udara sudah terealisasi sebagai berikut

:

- Pas orang dengan terealisasi sebesar Rp. 450.000,-
- Pas Kendaraan dengan terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,

- 1.2 3987.EBA.994 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu = Rp. 84.000.000,-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Jamuan tamu kedinasan terealisasi sebesar Rp. 22,137,983,-

Pada TW I Tahun 2024 persentase dan realisasi anggaran IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebesar Rp. 23.787.983,- atau bobotnya 11,09 %, sedangkan pada TW I 2023 realisasinya adalah Rp. 0 atau bobotnya 0% sehingga mengalami peningkatan sebesar 11,09%

Akar masalah

- Potensi keterlambatan Pengadaan ATK dan Komputer Suplies melalui Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) karena kersediaan barang dibutuhkan pada e-katalog terbatas
- Penyerapan anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan Pengadaan makanan/ minuman Penambah Daya Tahan Tubuh relatif rendah karena pegawai yang berhak menerima fasilitas pas pelabuhan laut/ udara dan makan/ minuman penambah daya tahan tubuh jumlahnya berkurang sebagaimana pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	Makanan/ minuma penambah daya tahan tubuh	59 orang	4 orang	Beberapa pegawai dimutasi ke Barantin Prov. Sulawesi Selatan
2	Pas Bandar Udara (pas orang)	83 orang	21 orang	
3	Parkir berlangganan (pas kendaraan)	38 kendaraan	17 kendaraan	
4	Pas Pelabuhan Laut	13 kendaraan	7 kendaraan	

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara operator komitmen dan operator persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan ke dalam aplikasi SAKTI
- Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa telah memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang/ jasa

Rekomendasi rencana aksi

- Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak penyedia terkait penyediaan barang dalam SPSE;
- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan anggaran Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

IK15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi terhadap Target TW I 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	1 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar				100	99,83	80	0	0	0	0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada triwulan I, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%).

Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2022 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:

- Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.
- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.324.260.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.249.000.000,-
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.237.939.000.-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan pada triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kendaraan telah terealisasi senilai Rp.53.852.441,- dari nilai pagu anggaran Rp.324.260.000,- atau 16,61 %
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan telah terealisasi senilai Rp.4.545.500,- dari pagu anggaran Rp.249.000.000,- atau 1,82 %
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi senilai Rp.68.531.990,- dari pagu anggaran Rp.237.939.000,- atau 28,80 %

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 % dari nilai bobotnya, atau capaiannya sebesar :

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Pagu Anggaran}} \times \textit{Bobot}$$

$$= \frac{\textit{Rp.296.336.941}}{\textit{Rp.811.199.000}} \times 12,5 \%$$

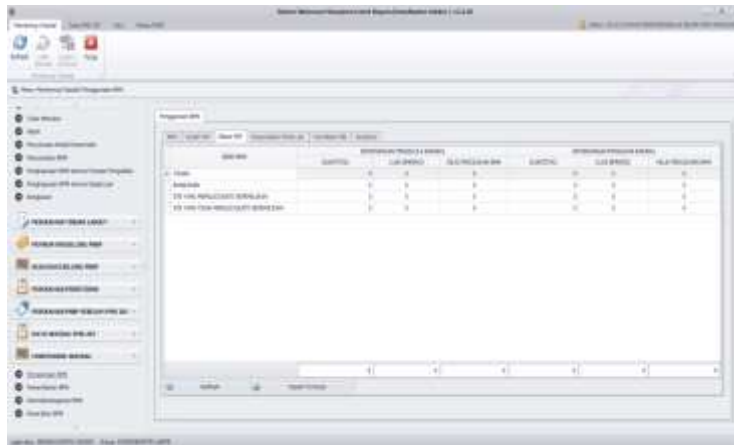
$$= 4,56\%$$

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

Pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi belanja modal pada RKAKL Balai Besar KIPM Makassar, sehingga usulan penetapan status untuk pengadaan belanja modal tahun 2024 tidak mungkin dilaksanakan. Akan tetapi penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Balai Besar KIPM Makassar pada aplikasi SIMAN

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

(Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



KATEGORI	JENIS BARANG	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	NILAI BERTAMBAH
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 25%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%).

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar belum mengusulkan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat karena menunggu penutupan periode 14 tahun 2023 (*audited*) pada Aplikasi SAKTI Modul GLP, Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.

Dengan demikian, IKU ini sudah terealisasi sebesar 0%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tahun Anggaran 2024 tidak tersedia alokasi anggaran kegiatan belanja modal sehingga penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk pencapaian target realisasi maka di berikan bobot sebesar 25%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Pada Triwulan I belum melakukan pencatatan dan penginputan data laporan tahun 2024 karena menunggu penutupan periode 14 tahun 2023 (*audited*) pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan serta penyusunan laporan BMN belum dilaksanakan karena belum sampai pada periode pelaporan (semesteran/ tahunan).

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan I adalah :

Unsur 1 (12,5%) + Unsur 2 (25%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (25%) + Unsur 5 (0%)
= 62,5 % dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(62,5\%/80\%) \times 100\% = 78,13\%$.

Jika dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 22,8%, maka capaian di triwulan yang sama mengalami kenaikan realisasi sebesar 39,7%.

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 2.822.713.000,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*) yang terdiri dari :

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	10.950.000	1.900.000	9.050.000	17,35
2	Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan	12.000.000	-	12.000.000	-
3	Layanan rumah tangga dan perlengkapan	13.955.000	2.419.500	11.535.500	17,34
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langgan Daya dan Jasa	895.380.000	247.101.174	648.278.826	27,60
5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langgan Perawatan kendaraan bermotor	347.314.000	57.963.941	289.350.059	16,69
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langgan Perawatan Gedung dan Bangunan	249.900.000	4.545.500	245.354.500	1,82
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langgan Keamanan Kantor, Pengemudi dan Pramu Bakti	1.293.214.000	287.061.000	1.006.153.000	22,20
TOTAL		2.822.713.000	600.991.115	2.221.721.885	21,29

Dengan demikian realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 600.991.115,- atau (21,29%).

Jika dibandingkan tahun 2023 dengan pagu total pendukung kegiatan sebesar Rp.42.339.000,-. Dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.2.995.000,- atau (7,07%) terjadi kenaikan realisasi yang sangat signifikan sebesar 14,22% di triwulan yang sama.

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 8 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Muda,
4. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,
5. Operator SAKTI Modul Persediaan,
6. Operator SAKTI Modul GLP,
7. Pengelola BMN,
8. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar permasalahan

Pengelola BMN dan Pengadmintrasi Sarana dan Prasarana tidak memahami uraian tugas sebagai tanggung jawabnya, sehingga saat ini tugas hanya dilaksanakan oleh Analis Laporan BMN.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Operator modul komitmen telah melaksanakan penginputan/pendetailan barang persediaan sesuai ketentuan.
2. Pemeliharaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan meliputi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rekomendasi rencana aksi

Meningkatkan pemahaman Pengelola BMN dan Pengadmintrasi Sarana dan Prasarana melalui pendampingan yang intensif:

1. Operator Persediaan : Niza Mahaputri
2. Pendataan BMN : Hapi, SAP
3. Pengadministrasi Sarpras : Halim

Pendamping : Kamdani, S.Pi, MP , Abdul Mubarak Azis

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM 111,59 (kategori Istimewa). Dari 15 IKU ada 5 Indikator kinerja yang melebihi target yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	99	100
2.	Penjamian Mutu hasil perikanan di wilayah RI	1	2
3.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	55	84
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	3,65	3,66
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80	100

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

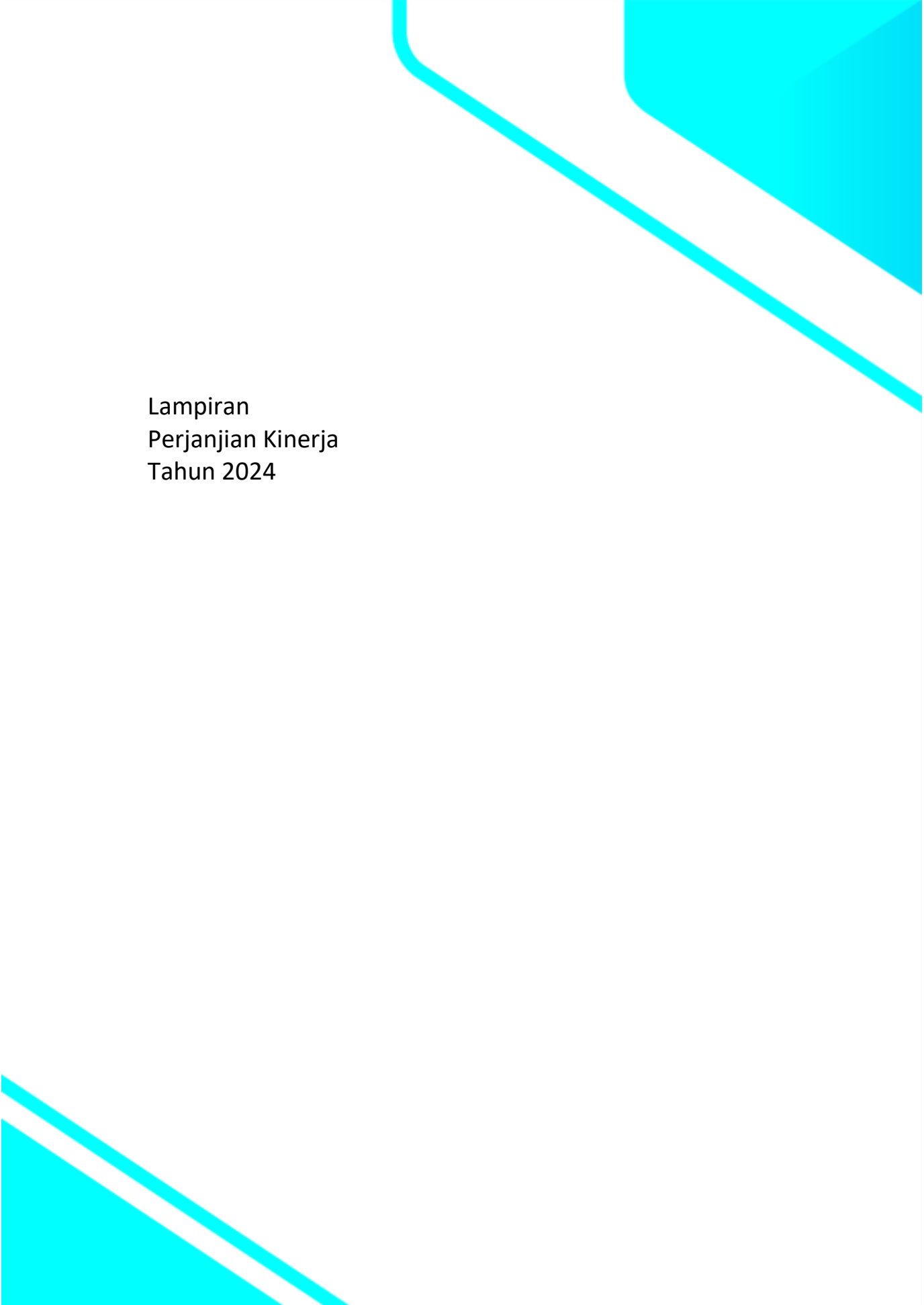
- Meningkatkan komunikasi (sharing session) dengan petugas verifikator dan inspektur mutu terkait persyaratan dalam rangka penerbitan sertifikat mutu (HC)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Menyampaikan hasil pengawasan mutu domestik dan rekomendasi kepada dinas kabupaten/kota yang hasil penilaian sarana dan prasarannya menunjukkan kondisi Cukup.
- Memanfaatkan kegiatan traceability pada UPI/UPRL sebagai sarana sosialisasi untuk peningkatan pemahaman tentang penerapan system traceability di UPI/UPRL
- Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi lebih awal dengan pihak UPI/UPRL terkait pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan sertifikasi HACCP.
- Penetapan petugas Customer Service untuk kegiatan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan
- Peningkatan kepatuhan Inspektur Mutu dalam hal penyelesaian administrasi melalui pembinaan dan pemantauan secara intensif.
- Melakukan update data untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan
- Meningkatkan pemahaman dan kecermatan verifikator keuangan dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja dengan *briefing* dan pengarahan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran;
- Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak penyedia terkait penyediaan barang dalam SPSE;



Lampiran
Perjanjian Kinerja
Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Zamrud**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar

Mohammad Zamrud

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	99
		2	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	4
		3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	60
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	345
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK.2.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	84
		6	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	1
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	18
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
SK 3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	100

		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93,76
		13	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80

Data Anggaran

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	789,300,000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1,371,500,000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.199.890.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024		12.360.690.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



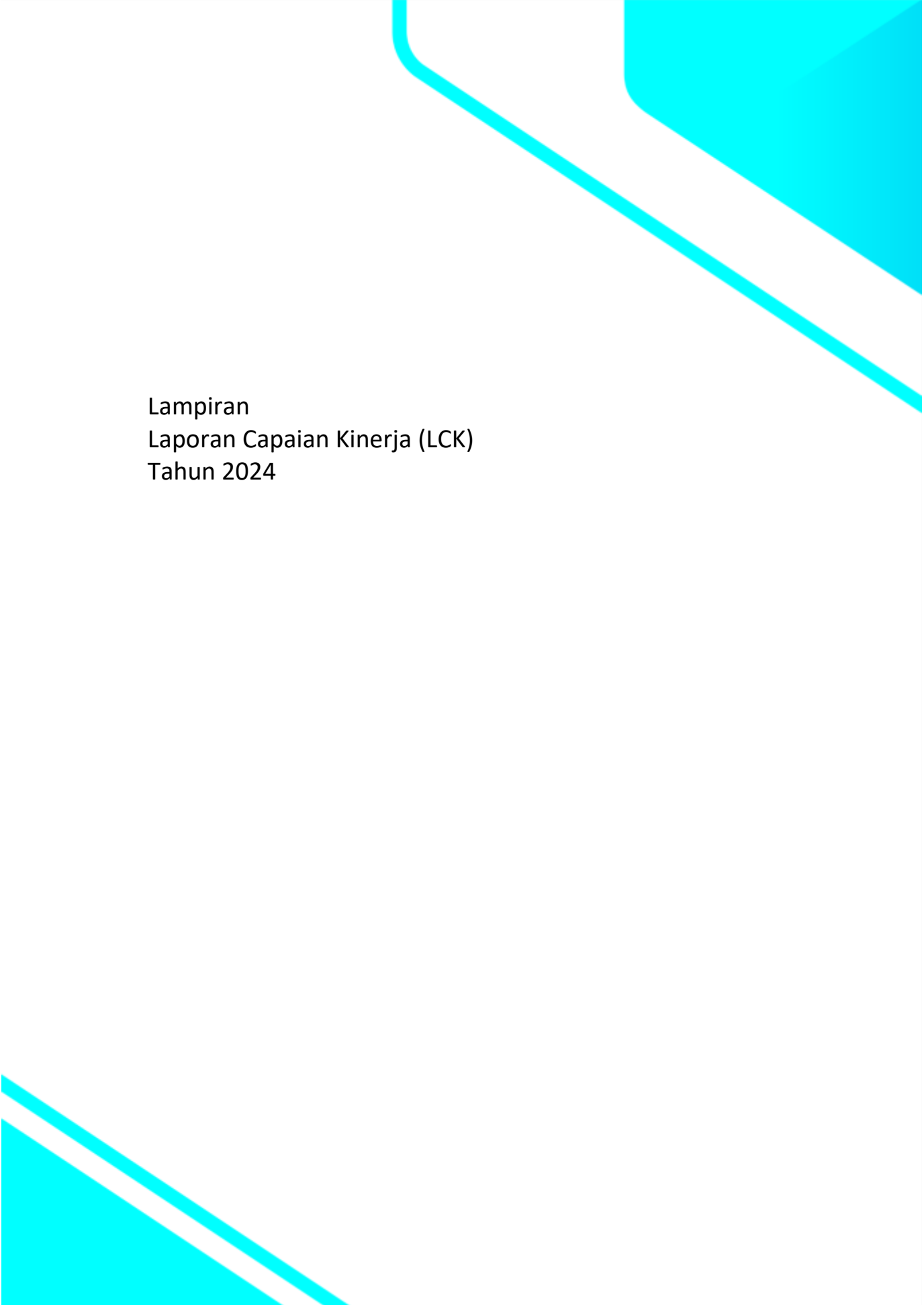
Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Mohammad Zamrud



Lampiran
Laporan Capaian Kinerja (LCK)
Tahun 2024

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 1	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99								99
Realisasi	100								
% Capaian	101								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<ul style="list-style-type: none"> Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik; Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor. Pada Triwulan I 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat, adapun pada Triwulan I 2023 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45.247 ton senilai Rp. 2,1 T dengan jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang diterbitkan sebanyak 2.195 sertifikat. Indikator Kinerja efektifitas Ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya sertifikat mutu (HC) di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan. Pada Triwulan I 2024 Bulan Januari terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan berupa <i>Frozen Flying Fish Roe</i> sebanyak 1 container dengan volume 12.000 Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan, penolakan disebabkan karena ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu : $X = \frac{A + B}{2}$ <p>dimana :</p> <p>A : <u>Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan - penolakan oleh negara tujuan</u> x 100% Jumlah HC karantina ekspor yang terbit</p> <p>Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi, Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHK Makassar, dan</p> <p>B : <u>Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan</u> x 100% Jumlah HC mutu ekspor yang terbit</p>

$$: \frac{2.444 - 0}{2.444} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

- Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, terjadi peningkatan persentase yaitu 99,97% di triwulan I 2023 menjadi 100% di triwulan I 2024.
- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I 2024	Persentase Realisasi
1	3989.ADF.001.051.a. Sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan	Rp. 25.925.000,-	Rp. 11.177.000.-	43,11 %
2	3989.ADF.001.051.b. Bimbingan Teknis CPIB Supplier	Rp. 6.575.000,-	0	0
3	3989.ADF.001.051.c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.631.000,-	48,41 %
4	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 20.000.000,-	Rp. 985.000,-	4,92%,

Sertifikasi CPIB pada supplier produk perikanan pada TW I 2024 terealisasi sebanyak 6 unit supplier dengan penyerapan anggaran sebesar 43,11 %, sedangkan untuk Bimtek CPIB pada supplier belum dilaksanakan karena menunggu arahan pelaksanaan jadwal dari Pusat Pengendalian Mutu.

Alokasi anggaran kegiatan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra sebesar Rp. 7.500.000,- adapun realisasi anggaran sampai Triwulan I sebesar Rp. 3.631.000,- atau 48,41 %, sisa anggaran akan dialokasikan ke kegiatan pengendalian mutu yang lain karena kegiatan ini sudah terealisasi seluruhnya sebanyak 5 UPI pada Triwulan I 2024.

Kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan I 2024 belum dilaksanakan dikarenakan tidak ada laporan kasus mutu, Adapun alokasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 985.000,- atau 4,92 % untuk pengadaan ATK.

Dengan demikian total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.793.000,- atau 41,94%

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

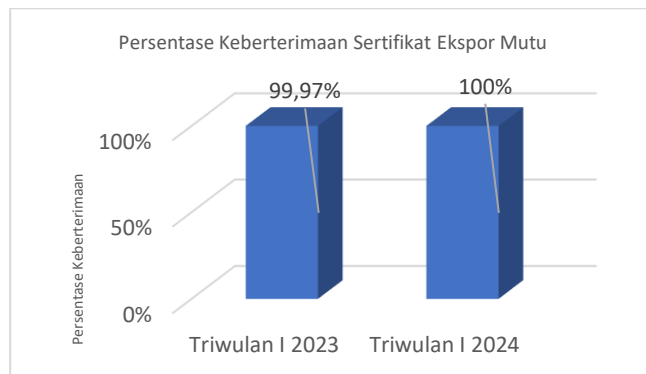
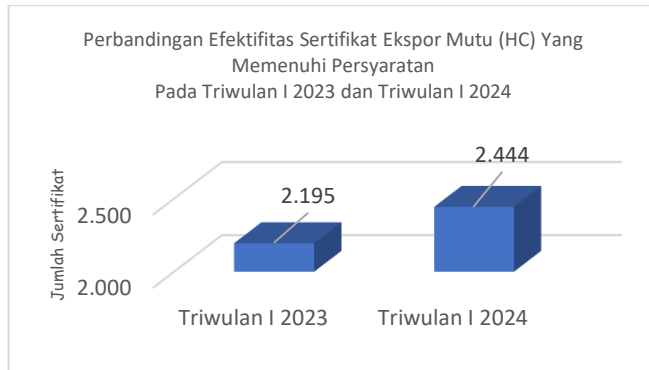
- Potensi masalah dapat terjadi jika petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait ketentuan negara tujuan ekspor pada tanggal 29 Januari 2024;
- Telah dilaksanakan Sharing Session dengan Inspektur Mutu dan petugas verifikator terkait pelayanan sertifikasi dan pengujian produk perikanan pada tanggal 18 Maret 2024;

- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Meningkatkan komunikasi (sharing session) dengan petugas verifikator dan inspektur mutu terkait persyaratan dalam rangka penerbitan sertifikat mutu (HC)	Ka. Timja Pengendalian Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	Triwulan II 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Mutu Hulu Hilir



B. Kegiatan Sharing Session Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan





C. Kegiatan Inspeksi CPIB di Supplier



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
Nama IKU 2	:	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	1	3	4	2	2	4	4		4
Realisasi	2	0	0						
% Capaian	100	0	0						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.</p> <p>Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.</p> <p>Pada triwulan I tahun 2024 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 2 lokasi kabupaten dengan jumlah 4 lokus yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Minasamaupa Sungguminasa dan Pasar Balang-Balang. 2. Kabupaten Takalar sebanyak 2 lokus yaitu PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar. <p>Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2024 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, PPI/TPI. 2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional dan PPI/TPI serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene. 3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium. <p>Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di 4 lokus dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya dan telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, <i>Echerichia coli</i>, <i>Coliform</i>, <i>Salmonella spp</i>, Formalin. Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu. Sedangkan untuk pengujian histamine masih dalam proses pengujian karena dilakukan di laboratorium Sub. Kontrak.</p> <p>Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya 2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan 3. Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu 4. Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran 5. Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Pendukung	Anggaran TH. 2024	Realisasi Tw I TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya	92.000.000	1.090.000	1.18	90.910.000
2	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan	20.000.000	-	-	20.000.000
3	Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu **	980.000.000	-	-	980.000.000
4	Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran **	3.000.000	-	-	3.000.000
5	Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha**	16.420.000	-	-	16.420.000

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik sebesar Rp. 77.240.000 yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar Rp. 10.671.929 atau 13,82%.

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.16.086.721, maka realisasi anggaran triwulan I 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 33,6%.

Jika alokasi anggaran tersebut ditotalkan dengan seluruh anggaran kegiatan pendukung, maka total anggaran sebesar Rp. 1.188.660.000.

Untuk kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya terealisasi sebesar 1,18% untuk pembelian sampel uji. Sedangkan anggaran perjalanan dinas untuk satu lokasi yang menjadi target triwulan I (TPI Beba) Takalar.

Diantara kegiatan pendukung indicator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA) yaitu Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu sedangkan kegiatan Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha masih diblokir karena menunggu terbentuknya SOTK UPT.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 adalah 18 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Perikanan Kabupaten, BBPOM Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Hasil Penilaian terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hygiene di sentra penyedia pangan sehat (pasar tradisional balang-balang dan pasar sentral Takalar) menunjukkan kondisi **Cukup**. Sementara untuk penyedia sentra pangan yang lain menunjukkan kondisi **Baik**.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 yaitu sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi pada tanggal 16 februari 2024 dan melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 2 lokasi yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Menyampaikan hasil pengawasan mutu domestik dan rekomendasi kepada dinas kabupaten/kota yang hasil penilaian sarana dan prasarannya menunjukkan kondisi Cukup.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2

Rapat Koordinasi dengan instansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik terkait 16 Februari 2024:.



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2024 Kab. Gowa





Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Pasar Minasa Maupa dan pasar Balang-balang Kab. Gowa





Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik
PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar Kab. Takalar



Rangkaian kegiatan pengujian mikrobiologi dan kimia dilaboratorium
Balai Besar KIPM Makassar

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Nama IKU 3	: Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

T/R	TAHUN 2023							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	15	15	30	15	15	30	60	-	60
Realisasi	15								
% Capaian	100								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Triwulan2, Triwulan3 dan Triwulan4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)		
➤	Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor komoditi perikanan. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan ditelusuri;	
➤	Realisasi kegiatan verifikasi traceability sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 15 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari target 15 UPI sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun lokus UPI/UPRL yang telah dilakukan verifikasi traceability disajikan pada tabel berikut.	
No	Nama UPI	Alamat
1.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi – Indonesia
2.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia
3.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Kima 4 Kav. P 3B, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia
4.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulya	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi – Indonesia
5.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD 15-16, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
6.	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	PT. Niaga Adijaya Mandiri	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia

8.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV Kav P3A, Kel. Daya. Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
9.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi – Indonesia
11.	CV. BUANA LAUT NUSANTARA	Jl. Kima VI Kav F1/B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
12.	CV. Mitra Alam	Jl. Lantebung No. 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. GLOBAL MAJU PRATAMA	Pattene Business Park Blok H No. 2, Desa Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
14.	CV. Sumber Bahari Mandiri	I. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	CV. RESKY BAHARI	Jl. Poros Makassar-Maros KM 24 Lingkungan Ballu Ballu, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia

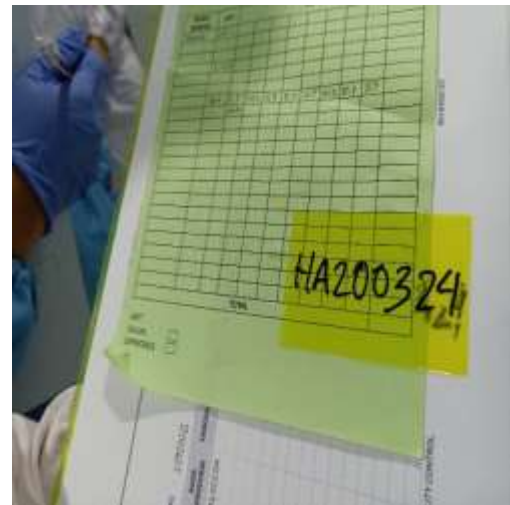
- Pada tahun 2024 target pelaksanaan verifikasi traceability adalah sebanyak 60 UPI, dan pada periode triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebanyak 15 UPI dari yang ditargetkan 15 UPI, sehingga tingkat capaiannya 100%;
- Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 25 UPI, maka terjadi peningkatan target sebanyak 35 UPI atau 140%;
- Realisasi pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 UPI dari 4 yang ditargetkan atau capaiannya 100% sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2024;
- Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi traceability pada 15 UPI tersebut diketahui bahwa seluruh UPI tersebut telah mengimplementasikan sistem traceability dan mampu telusur terhadap produk yang dihasilkan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir;
- Sebagai bukti penerapan traceability maka Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) Hasil Perikanan dan akan diserahkan kepada pihak UPI/UPRL yang bersangkutan;
- Untuk menunjang keberhasilan kegiatan verifikasi traceability, didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 16 orang yang merupakan pejabat Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar;
- Guna menunjang kegiatan verifikasi traceability, disediakan anggaran sebesar Rp. 210.060.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.280.000,- (2,51%) yang terdiri dari perjalanan dinas, sedangkan Pagu anggaran Traceability pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 25.500.000,- dan terealisasi pada TW I TA 2023 sebesar Rp. 4.330.000,- (16,98%) terdiri dari Belanja ATK komputer Suplier dan perjalanan evaluasi penerapan traceability.
- Dapat terlihat bahwa penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2024 lebih rendah dari pada TW I 2023 sebesar (14,47%). Hal ini di sebabkan adanya anggaran kegiatan bimtek sebesar Rp. 165.000.000,- (78,55 %) yang belum direalisasikan dan menunggu arahan dari Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meskipun hasil verifikasi traceability menunjukkan ke 15 UPI telah tertelusur, namun pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan sistem traceability masih belum optimal, terutama pada unit pengolahan ikan dengan ruang lingkup produk segar dan kering dan UPI Baru

Tindakan yang telah dilaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada Januari 2024 telah di susun dan di tetapkan program pelaksanaan traceability dengan target 60 UPI/UPRL dengan memprioritaskan UPI/UPRL yang memiliki grade HACCP A dan B ➤ Kegiatan verifikasi traceability telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/tahun 2019 tentang Penerapan system ketelusuran di Unit Pengolahan Ikan ➤ Pada tanggal 18 Maret 2024 dilaksanakan kegiatan <i>Sharing Session</i> Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang salah satu materinya adalah sosialisasi Per Ka BKIPM No. 170/tahun 2019

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memanfaatkan kegiatan traceability pada UPI/UPRL sebagai sarana sosialisasi untuk peningkatan pemahaman tentang penerapan system traceability di UPI/UPRL 	Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan mutu dan keamanan hasil perikanan	Triwulan II

**DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI TRACEABILITY
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) CV. MITRA ALAM**



**DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI TRACEABILITY
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) PT. PRIMA BAHARI INTI LESTARI**



**DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI TRACEABILITY
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) PT. WAHYU PRADANA BINA MULYA**



DOKUMENTASI KEGIATAN SHARING SESSION
18 MARET 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 4	:	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	55	80	135	113	97	210	345		345
Realisasi	84								
% Capaian	152								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJKMHP pada setiap UPI. Persyaratan SJKMHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJKMHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (*On Site Visit*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJKMHP yang dilakukan oleh UPI.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan untuk melihat penerapan sistem HACCP yaitu suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan yang telah diterapkan oleh UPI/UPRL. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat HACCP yang dilaksanakan 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun baik untuk UPI baru maupun perpanjangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan monev dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap UPI yang telah disertifikasi dan diterbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan manual IKU BKIPM tahun 2024 bahwa formula IKU diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical Control Point* (PMMT/HACCP). Nilai tersebut merupakan penggabungan dari hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan Sertifikat yang diterbitkan pada tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP dengan rumus :

$$A = B + C$$

A = Ruang lingkup produk yang disertifikasi PMMT/HACCP

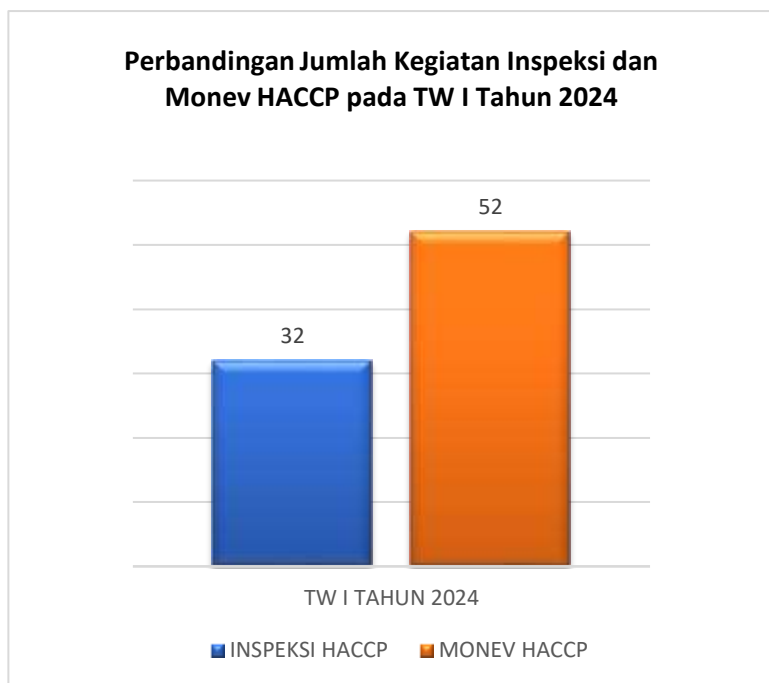
B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan sertifikat yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monev

$$\begin{aligned} A &= 32 + 52 \\ &= 84 \text{ sertifikat.} \end{aligned}$$

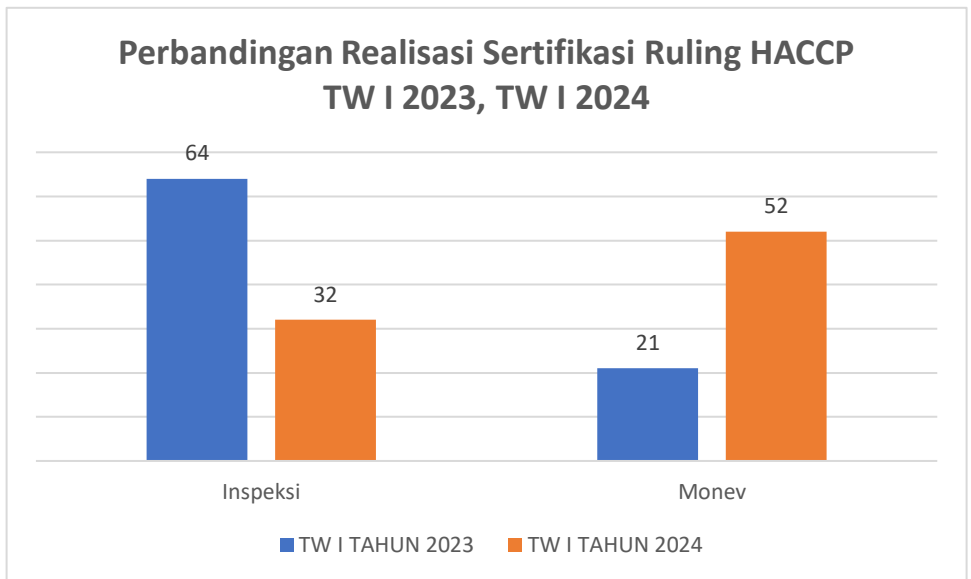
Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama TW I Tahun 2024 adalah sebanyak 84 sertifikat dari target 55 sertifikat ruang lingkup HACCP atau sebesar 152%. Jumlah tersebut terdiri dari 32 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan inspeksi PMMT/HACCP dan 52 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan monev PMMT/HACCP. Peningkatan capaian kinerja melebihi target sebesar 29 ruang lingkup atau 52% disebabkan karena:

1. Adanya permohonan sertifikasi baru
2. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup
3. Adanya permohonan kenaikan grade



Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2023, capaian realisasi jumlah sertifikat ruling HACCP pada TW I Tahun 2024 mengalami penurunan dari 85 sertifikat menjadi 84 sertifikat atau sebesar 1,18%. Fluktuasi capaian realisasi ini berada di luar kendali dikarena pelaksanaan kegiatan didasarkan pada permohonan dari unit pengolahan ikan / unit pengolahan rumput laut.

Perbandingan Realisasi Sertifikasi Ruling HACCP TW I 2023, TW I 2024



SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama tahun 2024 adalah 17 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Calon Inspektur mutu untuk kegiatan monev PMMT/HACCP. Jumlah ini beda dengan TW I Tahun 2023 sebanyak 26 orang. Penurunan ini disebabkan karena ada transformasi organisasi sehingga sebanyak 11 orang mutasi alih tugas ke Badan Karantina Indonesia.

Anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.445.000 atau 14,96 %, yang terdiri atas belanja bahan ATK dan Komputer Suplies Rp. 575.000, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 12.380.000, belanja perjalanan dalam kota Rp. 6.490.000

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 12.748.000 atau 9,44% dari total anggaran Rp.135.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW I 2024 sebesar 5,52%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Terdapat beberapa UPI/UPRL yang terlambat melakukan perpanjangan HACCP karena SKP kadaluarsa, sehingga harus dilakukan penolakan permohonan terhadap 3 UPI yang bermohon.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
2. Pada tanggal 26 februari s.d 1 maret tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan HACCP terhadap inspektur mutu di seluruh UPT BPPHKP dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari 2 orang dari BPPMHKP Makassar, dari UPI sebanyak 2 orang dan dari UPT lain sebanyak 36 orang Bertempat di hotel Novotel Makassar.
3. Telah dilaksanakan *sharing session* inspektur mutu pada tgl 18 maret 2024 di aula BPPMHKP Makassar yang salah satu materinya adalah Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
4. Penanggung jawab kegiatan telah memantau masa berlaku sertifikat HACCP setiap UPI/UPRL melalui aplikasi HACCP Online Sistem dan berkomunikasi secara intensif dengan pihak UPI/UPRL untuk mengantisipasi keterlambatan permohonan dari pihak UPI/UPRL yang dapat berdampak pada kelancaran ekspor UPI yang bersangkutan.
5. Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan *uploading* dokumen inspeksi di aplikasi HONEST untuk mendukung kelancaran proses penerbitan Sertifikat HACCP sesuai dengan janji layanan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi lebih awal dengan pihak UPI/UPRL terkait pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan sertifikasi HACCP.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2 Tahun 2024

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Triwulan I Tahun 2024

No.	Nama UPI / UPRL	Produk	Grade	Keterangan
1	PT. Anugrah Cahaya Samudera	Dried Sea Cucumber Dried Seaweed Dried Shark Fin	B B B	Inspeksi
2	CV. Anugrah Jaya Fishery	Fresh Demersal Fish	B	Inspeksi
3	PT. Anugrah Kelautan Abadi	Dried Seaweed	B	Inspeksi
4	PT. Anugrah Mapan Jaya	Dried Seaweed	B	Inspeksi
5	CV. Asryl Perkasa	Fresh Tuna	B	Inspeksi
6	PT. Dunia Marine Products	Dried Flying Fish Roe Frozen Cooked Abalone Meat	B	Inspeksi
7	CV. Guna Agung	Dried Seaweed	B	Inspeksi
8	CV. Guna Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Inspeksi
9	PT. Keumkang Industri Indonesia	Dried Cephalopods Dried Fish Dried Shrimp Fresh Demersal Fish Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Lobster Frozen Pelagic Fish Frozen Raw Shrimp Frozen Tuna	B B B B B B B B	Inspeksi
10	CV. Lemo dan Bungl	Dried Seaweed	C	Inspeksi
11	PT. Lontara Jaya Sakti	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Shellfish Frozen Tuna	B B B B	Inspeksi
12	PT. Mari Sejahtera	Dried Seaweed	A	Inspeksi
13	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Frozen Cephalopods	B	Inspeksi
14	CV. Sore Danggang	Dried Seaweed	B	Inspeksi
15	PT. Sukses Raya Food	Fresh Tuna Frozen Tuna	A A	Inspeksi
16	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Frozen Cooked	B	Inspeksi
17	PT. Asia Sejahtera Mina TBK	Dried Seaweed	B	Monev
18	PT. Sumber Gratia Mandiri	Dried Seaweed	B	Monev
19	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Fresh Slipper Lobster Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Slipper Lobster	A A A A	Monev

20	PT. Global Maju Pratama	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	A A A A	Monev
21	CV. Anugrah Lestari	Dried Fish Maw Dried Fish Skin Dried Sand Worm Dried Sea Cucumber	B B B B	Monev
22	CV. Karya Murni	Dried Abalone Dried Sea Cucumber Dried Shark (Fin, Skin, Bone) Frozen Sea Cucumber	B B B B	Monev
23	PT. Biru Laut Nusantara	Fresh Crab Fresh Milkfish Fresh Pelagic Fish Fresh Slipper Lobster Fresh Tuna Frozen Crab Frozen Demersal Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Pelagic Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna Frozen Milkfish	B B B B B B B B B B B B	Monev
24	CV. Guna Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Monev
25	Kospermindo, Koperasi	Dried Seaweed	B	Monev
26	PT. Bantimurung Indah	Alkali Treated Cottonii Dried Seaweed Semi Refined Carragenan	B B B	Monev
27	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	A A A	Monev
28	PT. Bahari Makmur Sejati Cabang Makassar	Frozen Shrimp	C	Monev
29	PT. Chenwoo Fishery	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Tuna	A A A A A A	Monev
30	PT. Ocean Champ Seafood	Pasteurized Crabmeat	B B	Monev
31	PT. Biota Laut Ganggang	Agar-Agar Powder Dried Seaweed Seaweed Powder	B B	Monev

KEGIATAN INSPEKSI PENERAPAN PMMT/HACCP



KEGIATAN MONEV PMMT/HACCP





KEGIATAN SHARING SESSION INSPEKTUR MUTU PADA TGL 18 MARET 2024



KEGIATAN PELATIHAN HACCP DASAR



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 5	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Realisasi	91,60								
% Capaian	109								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

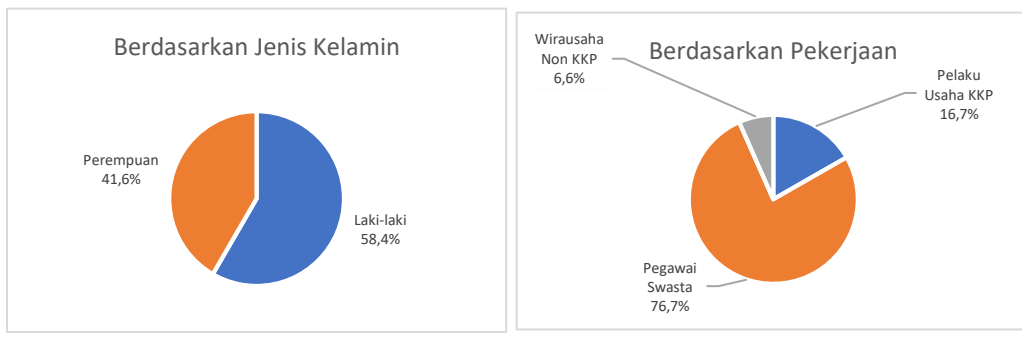
Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4

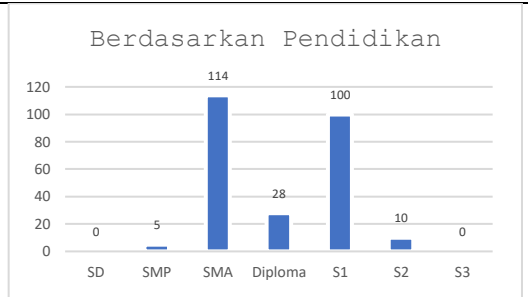
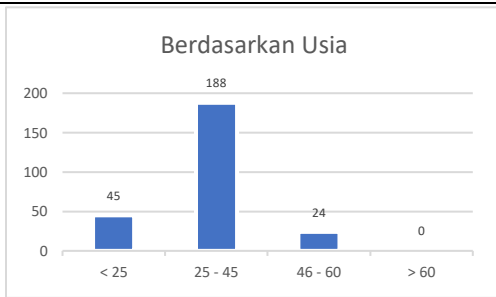
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14.</p> <p>Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.</p> <p>Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) 2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor) 3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i> 4. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air <p>Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:</p>

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan IV - 2023	Triwulan I - 2024	
1	Kesesuaian persyaratan	3,680	3,716	↑
2	Kemudahan prosedur	3,610	3,603	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,669	3,623	↓
4	Kesesuaian biaya	3,669	3,704	↑
5	Kesesuaian produk	3,664	3,712	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,630	3,626	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,540	3,588	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,620	3,689	↑
9	Kualitas isi/konten	3,723	3,716	↓

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan I Tahun 2024 yaitu :





Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kemudahan dalam penggunaan fitur.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode yang sama pada tahun 2023, maka nilai IKM pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dari 3,60 menjadi 3,66. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 belum ada atau sebesar Rp. 0,-, karena anggaran yang ada masih diblokir dan belum dapat dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

Total realisasi anggaran sampai dengan saat ini adalah sebesar 0%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu	Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran
		TW lalu	TW ini	s.d. TW ini	
Belanja bahan	5.500.000	0	0	0	5.500.000
Belanja perjalanan dinas biasa	7.000.000	0	0	0	7.000.000
Total	12.500.000	0	0	0	12.500.000

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Jumlah responden SKM di Triwulan I Tahun 2024 tidak sesuai dengan formula Isaac & Michael sebesar 335 responden. Untuk itu perlu penunjukan customer service pelayanan yang baru untuk menangani Survei Kepuasan Masyarakat pada kegiatan pelayanan sertifikasi HC Ekspor.
- Dari hasil pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat beberapa kritik dan saran untuk unsur kemudahan dalam penggunaan fitur sebagai berikut :

- Aplikasi Honest kadang lambat dan kadang data yang telah diinput tidak tersimpan
- Kesulitan dalam penggunaan aplikasi SSm Ekspor

Untuk aplikasi honest, server aplikasi berada di pusat pengendalian mutu sehingga penyelesaiannya berupa koordinasi dengan Pusat PM mengenai penggunaan aplikasi honest agar dapat lebih lancar diakses dan data yang telah diinput dapat tersimpan.

Untuk aplikasi SSm Ekspor, kewenangannya berada pada Kementerian Keuangan sehingga penyelesaiannya berupa koordinasi dengan LNSW dan Bea Cukai Makassar dalam penyelesaian layanan yang menggunakan SSm Ekspor.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan briefing pagi petugas pelayanan dan pengawasan pada tanggal 11 Januari 2024. Briefing pagi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BBKIPM

Makassar dengan tujuan meningkatkan semangat dan motivasi kerja petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu menjaga sikap dalam memberikan pelayanan.

- Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait cara pengisian survey Kepuasan Masyarakat pada tanggal 26 Maret 2024 oleh Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam kegiatan sosialisasi ini dipaparkan maksud dan tujuan survei kepuasan masyarakat, jenis layanan Balai Besar KIPM Makassar, hasil survei kepuasan masyarakat sebelumnya, dan permasalahan yang ada dengan pengisian kuisioner yang tidak sinkron antara penilaian dan saran yang diberikan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan perbaikan terhadap unsur yang memiliki nilai terendah, yaitu unsur kemudahan dalam penggunaan fitur berupa koordinasi dengan Pusat PM dan Bea Cukai Makassar dalam penggunaan aplikasi Honest dan Aplikasi SSm Ekspor - Peningkatan jumlah responden dengan cara pemberian link kuisioner kepada pengguna layanan setiap kali selesai pemberian layanan kepada pengguna jasa - Penetapan petugas Customer Service untuk kegiatan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan 	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Triwulan II 2024

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2024



Gambar 1. Infografis Nilai IKM Triwulan I Tahun 2024



Gambar 2. Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



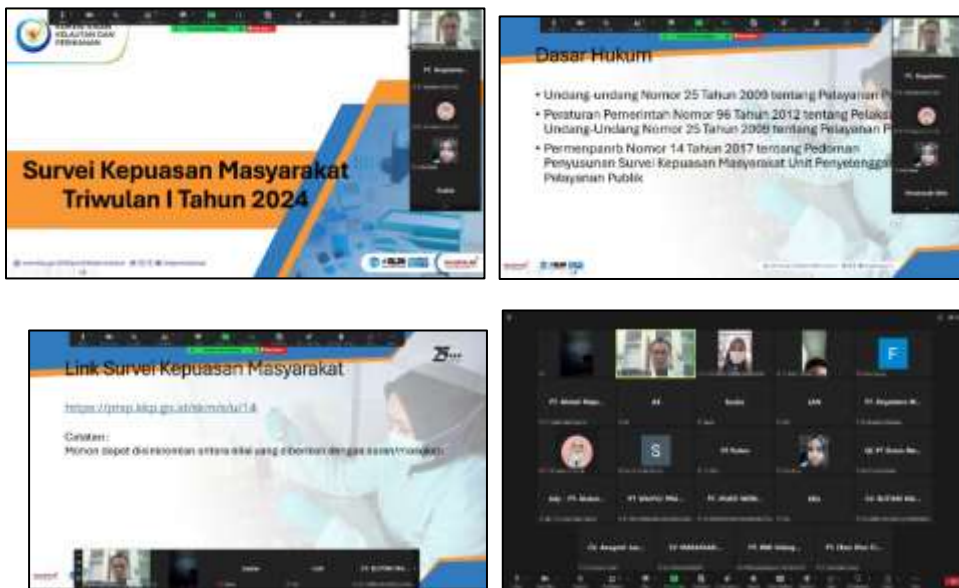
Gambar 3. Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan



Gambar 4. Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat



Gambar 5. Dokumentasi Briefing Petugas Pelayanan terkait Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tanggal 11 Januari 2024



Gambar 7. Dokumentasi sosialisasi kepada pengguna layanan terkait cara pengisian survey Kepuasan Masyarakat pada tanggal 26 Maret 2024

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
Nama IKU 6	:	Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Realisasi	1	-	-	-	-	-	-	-	
% Capaian	100%								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; ▪ Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan; ▪ Surveilans merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) berjalan secara konsisten dan efektif; ▪ Tujuan dilaksanakannya surveilan adalah untuk memastikan penerapan GMP-SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut berjalan secara konsisten dan efektif yang nantinya menjadi data dukung dalam penyusunan laporan surveilan tahunan. Hasil dari surveilan menjadi dasar bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (<i>Health Certificate</i> /HC) ▪ Output dari pelaksanaan surveilan adalah penerbitan Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yaitu surat keterangan yang diberikan kepada UPI/UPRL yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara efektif sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor; ▪ Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan surveilan sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL); ▪ Berdasarkan program tahunan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP lingkup Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 yang telah disusun, pada triwulan I Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL, dari target 100 dapat direalisasikan 91 sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 91%. ▪ Adapun 9% yang tidak terealisasi disebabkan adanya unit pengolahan ikan yang tidak melakukan kegiatan proses produksi dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai dari pihak UPI yang bersangkutan. Dengan demikian sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) pada triwulan I terealisasi sebanyak 1 unit. ▪ Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 184.440.000,- yang digunakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja bahan sebesar Rp. 960.000,-;

(2) Belanja barang persediaan bahan baku sebesar **Rp. 47.000.000,-**

(3) Belanja perjalanan dinas biasa sebesar **Rp. 109.180.000,-**

(4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar **Rp. 27.300.000,-**

- Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 41.934.800,-** atau **22,74%**, dengan rincian seagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Belanja bahan	960.000	885.000	75.000
2	Belanja barang persediaan bahan baku	47.000.000	1.925.000	45.075.000
3	Belanja perjalanan dinas biasa	109.180.000	26.483.800	82.696.200
4	Belanja perjalanan dinas dalam kota	27.300.000	12.641.000	14.659.000
	Jumlah	184.440.000	41.934.800	142.505.200

- Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 14 orang Inspektur Mutu dan 2 orang asisten inspektur mutu. Sehubungan dengan banyaknya program kegiatan pengendalian yang harus dilaksanakan dan adanya keterbatasan jumlah IMUT dan AIMUT maka kegiatan ini melibatkan 2 orang pejabat fungsional APK APBN yang telah memiliki Nomor Registrasi Inspektur Mutu sebagai anggota.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Sebagian Inspektur Mutu tidak tepat waktu dalam melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh unit pengolahan ikan serta lambatnya inspektur mutu menyerahkan berkas surveilan kepada penanggung jawab kegiatan, sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan SKHS.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan kegiatan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada unit Pengolahan ikan/unit Pengolahan Rumput Laut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021;
- Telah dilaksanakan *knowledge sharing* sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada tanggal 18 Maret tahun 2024 di Aula BPPMHK Makassar Jalan Dakota No. 24 Sudiang dengan salah satu materinya adalah surveilan dan pengambilan sampel dalam rangka *official control*.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Peningkatan kepatuhan Inspektur Mutu dalam hal penyelesaian administrasi melalui pembinaan dan pemantauan secara intensif.	Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Triwulan II 2024

Adapun Rincian Nama-nama Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut yang telah terealisasi pada Triwulan I 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama UPI/UPRL	Alamat
1.	Kospermindo Koperasi	Jl. Kima 8 Kav. 3A1 Makassar South Sulawesi - Indonesia
2.	CV. Adiwandi Hanania Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 1 Gudang Blok 1, Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
3.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi -Indonesia
4.	PT. Armita Laut Nusantara	Jl. Tarakan Lr 155 No. 14, Kel. Malimongan Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
5.	PT. Blue Ocean Resources	Jl. Kompleks Perhubungan No. 5, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi Indonesia
6.	PT. Celebes Berkah Niaga	Pergudangan Pelitagro Blok A No.15, Jl. Ir. Sutami No 24, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	CV. Faris Indo Seafood	Pattene Business Park Blok K No. 2, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
8.	CV. Guna Bahari Indonesia	Pergudangan Patene 88 Blok N No.1, Jl. Business Park, Ds.Pabentengan, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
9.	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Jl. Lantebung No. 99 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No. 1 Gudang A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
11.	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No.1 Bulu-Bulu, Kelurahan Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
12.	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. KIMA Raya I Kav. D-1B Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya 1 Blok D-2B Kawasan Industri Makassar
14.	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima III Kav. 5AB, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
16.	PT. Sumber Gratia Mandiri	Pergudangan Pattene Business Park Blok B No. 8-9, Desa Pa`bentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
17.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
18.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Ujungpandang Baru No. 17 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
19.	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jalan Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
20.	PT. Perikanan Indonesia (Persero) Cabang Makassar	Jl.Sabutung I No.1, Kelurahan Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
21.	PT. Piala Laut Indonesia	Jl. Kima 17 Kav. DD9 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
22.	PT. South Suco	Jl. KIMA VI Blok G - 4, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesi
23.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10 Kav. C - 3A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
24.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10T - 2B, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
25.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
26.	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4-B1 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
27.	CV. Gembira Galesong	Jl. Abdul Kadir, Desa Galesong Kota, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
28.	PT. Giwang Citra Laut	Jln. Poros Pabrik Gula Takalar KM.1,5 Desa Parappunganta,Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
29.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
30.	PT. Sumber Lautan Nusantara	Jl. Lantebung No. 168, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
31.	PT. Inti Mulia Cahaya	Jln. Pelabuhan Paotere Makassar, South Sulawesi - Indonesia

32.	CV. Mitra Alam	Jl. Lantebung No. 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
33.	PT. Asia Sejahtera Mina (Sutami)	Jl. Ir. Sutami No. 24 Blok A1 Kawasan Logistik Terpadu, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
34.	PT. Kawa Gutti	Jl. Ir. Sutami (Tol Lama) No. 22 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
35.	PT. Flying Fish Algae	Jl. Ir. Sutami No. 19, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
36.	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59, Tallo Lama Makassar, South Sulawesi - Indonesia
37.	CV. Asryl Perkasa	Perumahan Citra Sanggalea Indah, Blok D4 No. 4, Kel. Taroad, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
38.	PT. Niaga Adijaya Mandiri	Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
39.	CV. Buana Laut Nusantara	Jl. Kima VI Kav. F.1 B1, Kota Makassar, 90243, South Sulawesi - Indonesia
40.	PT. Global Maju Pratama	Pattene Business Park Blok H No. 2, Desa Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
41.	CV. Reski Bahari	Jl. Poros Makassar Maros Km. 24 Ballu - Ballu Maros, South Sulawesi - Indonesia
42.	PT. Bantimurung Indah	Desa Allepolea, Jl. Raya Maros, South Sulawesi - Indonesia
43.	PT. Asia Sejahtera Mina	Pergudangan 88 Pattene Biz Park R-30, Kel. Pabenteng, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
44.	PT. Bintang Megah Jaya Perkasa	Jl. Poros Maros No. 50 Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
45.	PT. Tujuh Samudra Jaya	Jl. Malino Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Gowa, South Sulawesi - Indonesia
46.	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima 8 Kav. SS No. 23A Kawasan Industri Makassar, Kel. Birra, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
47.	CV. Anugerah Jaya Fishery	Jl. Poros Maros, Ruko Graha Cemerlang Blok C No. 10-11, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
48.	CV. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2 - 10 Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
49.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV KAV. P-3A, KIMA Makassar, South Sulawesi - Indonesia
50.	PT. Biota Laut Ganggang	Jl. Kebangkitan No.8, Dusun Belabelawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, South Sulawesi - Indonesia
51.	PT. Bumi Menara Internusa	Jl. Kima 15 Kavling R No.4C, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
52.	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng Batu - Batu, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi - Indonesia
53.	PT. Rahmat Bahari Indonesia	Jl. Kima 14 No. F2 SS3 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
54.	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdulah Raya Lorong 3 No. 9 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
55.	PT. Jaya Utama Quality	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
56.	PT. Sutraco Nusantara Mega	Pattene 88 Cluster Green Park Blok C No. 18 & 20 Maros, South Sulawesi - Indonesia
57.	PT. Guna Bahari Indonesia (Parangloe)	Pergudangan Parangloe Indah Blok I - 1 No. 3 Jl. Ir. Sutami, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
58.	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Jl. Kima 6, Kav F3/B1-B2, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
59.	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4B Makassar South Sulawesi - Indonesia
60.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
61.	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K-9/Kav.B2 Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
62.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD No. 15 - 16 Makassar, South Sulawesi - Indonesia

63.	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
64.	PT. Karisa Timur Indonesia	Jl. Pattene Raya Ruko Noni No. 3 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
65.	CV. Najwa Bahari	Jl. Sabutung Baru III No. 25 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
66.	CV. Alga Marina Sukses	Jl. Ir. Sutami 107, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
67.	CV. Anugerah Lin Perkasa	Jl. Kima No. 20 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
68.	CV. Karya Murni	Kampung Parang Dusun Jonggo Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
69.	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G8, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
70.	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No. 42 Km. 147 Bojo Barru Kec. Mallusetasi, Barru, South Sulawesi - Indonesia
71.	PT. Dwira Masagena	Jl. Kima Raya 1 Kav. B5, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
72.	CV. Karya Nelayan	Ruko Graha Cemerlang Blok E No. 16-17 Poros Makassar- Maros Km 21, Kelurahan Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
73.	PT. Anugrah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
74.	PT. Manara Atha Samudra	Jl. Kima 10 Kav T-3 A, Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
75.	PT. Bahari Makmur Sejati	Jl. KIMA 16 Kav BB No. 4 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
76.	PT. Cahaya Cemerlang	Jl. Ir Sutami 22, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
77.	PT. Rahmat Bahari	Jl. Poros Pattene, Kompleks Pergudangan Pattene Busines Park, Blok H No. 1 Kel. Temmappadaue, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
78.	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Pendidikan No. 8, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
79.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
80.	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar - Pangkep) Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros South Sulawesi - Indonesia
81.	PT. Asnur Anton Jaya	Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
82.	PT. Anugerah Mapan Jaya	Jl. Poros Kariango, Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
83.	PT. Maa Ataita Indah	Jl. Kapasa Raya No.29 B, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
84.	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. KIMA 15 Kav. R4D-R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
85.	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Hombes, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, South Sulawesi-Indonesia
86.	UD. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3 NO.10, Komp. Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
87.	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No. 3A Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
88.	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jln. Sabutung No. 3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
89.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Business Park Blok U 3B, Maros, South Sulawesi - Indonesia
90.	CV. Lintas Samudera Mandiri	Kompleks PPI Lonrae Kav. 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, South Sulawesi - Indonesia
91.	PT. Nusadwipa Citra Tunggal	Jl. Kima 7 Blok J No. 4A, Makassar, South Sulawesi - Indonesia

**DOKUMENTASI KEGIATAN KNOWLEDGE SHARING SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DI AULA BPPMHPK MAKASSAR JALAN DAKOTA NO.24 SUDIANG PADA TANGGAL 18 MARET 2024**



DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL di UNIT PENGOLAHAN IKAN DALAM RANGKA OFFICIAL CONTROL



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 7	:	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	-	-	6	12	18	18	18	18
Realisasi	0								
% Capaian	0								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan
Tw4Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 +
Capaian Q4 Tahunan = Capaian di
akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan membuahkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan sampah plastik di laut.

Quality Assurance sesuai Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 yaitu kegiatan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM/KHP) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. BKIPM selaku otoritas kompeten mendapat mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tahun 2024 Verifikasi Quality Assurance terhadap produksi hulu-hilir berdasarkan manual IKU BKIPM, formula IKU diukur dengan menghitung jumlah lokasi yang telah dilakukan yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Adapun lokasi kegiatan Verifikasi QA tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2023 tentang Lokasi Kampung Nelayan Maju sebanyak 4 (empat) lokasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya sebanyak 14 (empat belas)

- Lokasi Kampung Nelayan Maju :
 1. Pontap Desa/Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten/Kota Palopo
 2. Bonto Lebang, Desa/Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng
 3. Mattirotasi, Desa/Kelurahan Matirotasi, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang
 4. Lonrae, Desa/Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone
- Lokasi Kampung Perikanan Budidaya :
 1. Rumpu laut, Kabupaten Bantaeng,
 2. Bandeng, Kabupaten Bone

3. Rumput laut, Kabupaten Luwu
4. Bandeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Windu, Kabupaten Pinrang
6. Rumput laut, Kabupaten Takalar
7. Rumput laut, Kabupaten Wajo
8. Mas, Kabupaten Toraja Utara
9. Nila, Kabupaten Bulukumba
10. Nila, Kabupaten Enrekang
11. Nila, Kabupaten Gowa
12. Rumput laut, Kabupaten Maros
13. Nila, Kabupaten Sinjai
14. Nila, Kabupaten Soppeng

Pada triwulan I tahun 2024, kegiatan Verifikasi QA terhadap produk perikanan hulu –hilir di Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya dengan 18 (delapan belas) lokasi belum dilaksanakan karena adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA).

Jika dibandingkan dengan target capaian IKU di Tahun 2023 yaitu 2 lokasi kampung perikanan budidaya, maka di Tahun 2024 terdapat penambahan 16 lokasi kegiatan.

Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan Quality Assurance terdiri dari inspektur Mutu Ahli Madya, Inspektur Mutu Ahli Muda, Asisten Inspektur Mutu dan dukungan manajerial. Personil yang terlibat pada kegiatan Tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023 di sebabkan karena adanya reorganisasi

Kegiatan pendukung

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	3990.PBR.001 Penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM dalam rangka Quality Assurance produk hasil perikanan	90.000.000	-
2.	3990.PDD.001 Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing	65.000.000	-
3.	3990.PDD.002 Penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi (ISO 17020) untuk mendukung BKIPM sebagai Quality Assurance produk perikanan	25.000.000	-
4.	3990.QIA.001 Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance padaproses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP)	179.580.000	-

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024 bersumber pada kegiatan usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi dengan total anggaran sebesar Rp. 199.000,000, Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 28.000.000 terdapat kenaikan yang cukup signifikan atau sebesar 85,93%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Waktu pelaksanaan kegiatan Verifikasi QA Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya tidak dapat dilaksanakan di sebabkan adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pada Januari 2024 telah menyelesaikan laporan kegiatan verifikasi Quality Assurance TW IV 2023
- Membuat Surat Tugas tim pelaksana kegiatan verifikasi Quality Assurance tahun 2024

Rekomendasi rencana aksi	PenanggungJawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan Tim verifikasi QA Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q2

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 8	:	Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN							Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	
Target	-	81	81		84	84	84	84
Realisasi	56,32							
% Capaian	67,04 %							

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;
- Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;
- IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah Pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh seorang ASN dengan Nilai maksimal bobot 25.
Nilai Pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan Jenjang Jabatan :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh						Dibawah SLTA
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat		
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5	
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5	
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10	
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15	
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	23	22	21	20	15	
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	23	20	15	10	5	

2. Kompetensi adalah Pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan seminar dengan Nilai bobot 40.
Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- **Komponen Diklat Fungsional** diambil dari data kursus dengan tipe kursus “**Diklat Fungsional**”. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun.
- **Komponen Diklat 20JP** diambil dari data kursus dengan tipe “**Diklat Fungsional atau Diklat Teknis**” yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. **Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung** apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP.
- **Komponen Seminar** diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- a. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - b. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - c. Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5
3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30
Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :
- a. Nilai 30 (sangat baik)
 - b. Nilai 25 (baik)
 - c. Nilai 20 (butuh perbaikan)
 - d. Nilai 15 (kurang)
 - e. Nilai 10 (sangat kurang)

Tabel gambar

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5
Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplini sebagai berikut :
- a. Tidak Pernah 5
 - b. Ringan 3
 - c. Sedang 2

d. Berat 1

- Target Tahunan IP ASN 2024 adalah 84 IP
Semester I : 81
Semester II : 84

- Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3	:	= 0 pegawai x 25	= 0
2. S2	: - Jabatan Pimpinan Pratama	= 1 pegawai x 23	= 23
	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 14 pegawai x 23	= <u>322</u>
			<u>345</u>
3. S1	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 38 pegawai x 20	= 760
	: - Jabatan Pengawas	= 1 pegawai x 21	= 21
	: - Jabatan Pelaksana	= 9 pegawai x 22	= 198
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 3 pegawai x 22	= <u>66</u>
			<u>1.045</u>
4. D3	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 10 pegawai x 21 =	<u>210</u>
			<u>210</u>
5. SMA	: - Jabatan Pelaksana	= 13 pegawai x 20	= 260
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 4 pegawai x 20	= <u>80</u>
			<u>340</u>
<u>Jumlah Total</u>			<u>1.940</u>

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.940}{93} = 20,86$$

Jadi pada Triwulan I diperoleh nilai rata-rata Kualifikasi Pendidikan **20,86**

Pada triwulan I nilai kualifikasi pendidikan sebesar 20,86 ini berarti nilai kualifikasi pendidikan sama dengan nilai kualifikasi pendidikan untuk nilai kualifikasi pendidikan tahunan 2023.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

- 76 pegawai ASN mendapat nilai 25 = 76 x 25 = 1.900
 - 13 pegawai ASN mendapat nilai 17,5 = 13 x 17,5 = 227,5
 - 3 pegawai ASN mendapat nilai 15 = 3 x 15 = 45
 - 1 pegawai ASN mendapat nilai 10 = 1 x 10 = 10
- Jumlah 2.182,5

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{2.182,5}{93} = 23,47$$

Jadi pada triwulan I diperoleh nilai rata-rata Kompetensi ASN sebesar **23,47**

Pada Triwulan I nilai Kompetensi ASN sebesar 23,47 ini berarti ada penurunan sebesar 16,53 karena pada nilai kompetensi tahunan 2023 memperoleh nilai 40.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 26 orang ASN memperoleh nilai PPKP dengan predikat Baik sehingga mendapat bobot nilai $25 = 26 \times 25 = \underline{650}$
- 67 orang ASN tidak dinilai = 0

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{650}{93} = 6,99$$

Jadi pada Triwulan I 2024 diperoleh nilai rata-rata Kinerja **6,99**

Pada Triwulan I nilai Kinerja sebesar 6,99 ini berarti ada penurunan Nilai kinerja sebesar 17,42 dibanding nilai kinerja tahunan 2023 dimana nilai kinerja tahunan 2023 sebelumnya sebesar 24,41.

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 93 orang ASN mendapat nilai 5 = 465

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{465}{93} = 5$$

Jadi pada Triwulan I 2024 diperoleh nilai rata-rata Disiplin **5**

Pada Triwulan I nilai disiplin sebesar 5 ini berarti tidak ada perubahan pada nilai disiplin untuk nilai tahunan 2023 sebelumnya.

- **Pencapaian untuk Triwulan I Tahun 2024 nilai capaian sebesar 56,32 indeks profesionalitas (IP) yaitu :**

1. Kualifikasi pendidikan = 20,86 IP
2. Kompetensi = 23,47 IP
3. Kinerja = 6,98 IP

4. Disiplin = 5 IP

- **Nilai Realisasi IP ASN = Kualifikasi Pendidikan + Kompetensi + Kinerja + Disiplin**
= 20,86 + 23,47 + 6,99 + 5
= 56,32

Untuk mengetahui dalam bentuk presentasi (%) Capaian IP ASN yaitu :

$$\text{Presentase (\%)} \text{ Capaian IP ASN} = \frac{\text{Nilai Realisasi IP ASN}}{\text{Target Tahunan IP ASN}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Presentase (\%)} \text{ Capaian IP ASN} &= \frac{56,32}{84} \times 100 \% \\ &= 67,04 \% \end{aligned}$$

- Untuk tahun 2024 ini target IP ASN adalah target semesteran namun sebagai acuan diperlukan perbandingan nilai capaian realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2023 untuk sebagai bahan perbandingan yaitu :

- Realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2024 = 56,32
- Realisasi IP ASN Triwulan I Tahun 2023 = 75,99

Ini berarti terjadi penurunan realisasi sebesar 19,67 IP untuk Triwulan I tahun 2024 dibanding Triwulan I Tahun 2023

- Untuk Pegawai ASN yang terlibat dalam pencapaian target pada Triwulan I tahun 2024 sebanyak 93 orang, terdiri dari :

- Kepala 1 orang,
- Kepala Sub Bagian Umum 1 orang
- pengelolaan Keuangan APBN 3 orang
- Inspektur Mutu Hasil Perikanan 26 orang
- PHPI 45 orang
- Analisis Kepegawaian 1 orang
- Arsiparis 1 orang
- Pranata Komputer 1 orang
- Fungsional Umum 14 orang

- Pada triwulan I terjadi mutasi alih tugas fungsional PHPI dari Balai Besar KIPM Makassar ke Balai Besar Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan Sebanyak 60 orang pegawai yang disebabkan oleh transformasi kelembagaan, dan 1 orang pegawai memasuki masa purnabakti hal itu menyebabkan pegawai BBKIPM Makassar menjadi 32 orang Pegawai.
- SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum, dan pengelola kepegawaian terdiri dari Analisis SDM Aparatur, Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan.
- Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.925.000,- terdiri dari anggaran:

1. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan - Peningkatan kompetensi SDM sebesar Rp. 12.000.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-
 2. Refreshmen panelis organoleptic sebesar Rp. 3.560.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-
 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebesar Rp. 21.851.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 3.600.000,-
 4. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp. 36.514.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 0,-
- Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website www.ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum dilakukannya update data pegawai untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan dimana seluruh penilaian kinerja pegawai yang mutasi sudah tidak ternilai lagi di Balai Besar KIPM Makassar.
- Belum adanya pegawai yang memenuhi diklat 20 JP untuk penilaian kompetensi pegawai

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan rekapitulasi sertifikat pelatihan pegawai secara berkala
- Menyampaikan kepada pegawai untuk mengupdate data diklat/ pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id
- Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada myasn.bkn.go.id
- Telah dilaksanakan briefing pagi pada tanggal 26 Januari 2024 yang salah satu substansi penyampaiannya adalah menghimbau pegawai untuk memenuhi bukti dukung prestasi kinerja pegawai.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan update data untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan - Menyampaikan kepada pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan/seminar/ webinar, diklat dan pengembangan kompetensi lainnya terutama untuk kegiatan diklat yang memiliki Jam Pembelajaran 20 JP dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id. 	Ketua Tim DUKMAN Karwit, S.Pi	Triwulan I Tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan :

Capaian nilai IP ASN per tanggal 1 April 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARIAT BAGIAN KARANTINA RUMAH PENGENDALIAN MUTU DAN KESEHATAN HASIL PERIKANAN	73	21,22	84,88 %	35,8	39 %	17,02	57,07 %	4,88	93,2 %	58,6	SANGAT RENDAH
2	PUSAT KARANTINA RUMAH	42	21,83	87,32 %	21,56	53,86 %	1,79	5,97 %	4,81	96,2 %	49,88	SANGAT RENDAH
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	32	21,08	84,12 %	14,90	37,3 %	11,08	36,97 %	4,81	96,2 %	51,86	SANGAT RENDAH
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KERTUHANAN	34	31,8	88 %	39,99	47,98 %	5,75	17,07 %	4,81	96,2 %	50,75	SANGAT RENDAH
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA 1	21	20,9	85,0 %	21,07	52,68 %	14,29	47,63 %	5	100 %	61,28	RENDAH
6	BALAI BESAR KIPM KARASIDAR	33	22,86	83,44 %	23,47	58,67 %	8,30	27,3 %	5	100 %	56,32	SANGAT RENDAH
7	BALAI KIPM DENPASAR	48	21,38	84,72 %	39,34	48,35 %	11	37 %	5	100 %	50,82	SANGAT RENDAH

Foto Aktifitas operator





Briefing Pagi pada tanggal 26 Januari 2024



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 9	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	-	-	-	82	82	82		82
Realisasi	50,2	-	-	-	-	-	-		
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.</p> <p>Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa : Renstra 2020-2024, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi. Untuk dokumen Renja masih dalam proses perbaikan Dengan demikian capaian parameter ini adalah sebesar 22,5 % 2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 % Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa : Penyusunan Manual IKU tahun 2024 serta pengesahannya telah dipenuhi sehingga nilai parameter ini mencapai bobot 30 % 3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 % Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan. Pada triwulan I telah dilakukan pengumpulan data dan verifikasi kesesuaian data dukung capaian kinerja.

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

- Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan perhitungan tahunan.
 - Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.498.000,- yang terdiri dari
 - a. Layanan Hubungan masyarakat sebesar Rp 12.470.000,-
 - b. Layanan data dan informasi sebesar Rp 14.028.000,-
- Sampai dengan triwulan I teralisasi anggaran sebesar Rp 900.000 atau 7,22 %
- Jika dibandingkan pada tahun 2023 pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 16.400.000,-, mengalami kenaikan anggaran sebesar 61,57%.
 - Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2023 yang sebesar 49,78%, maka mengalami penurunan realisasi sebesar 42,56 %.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Muda, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Keuangan, Analis Laporan BMN)

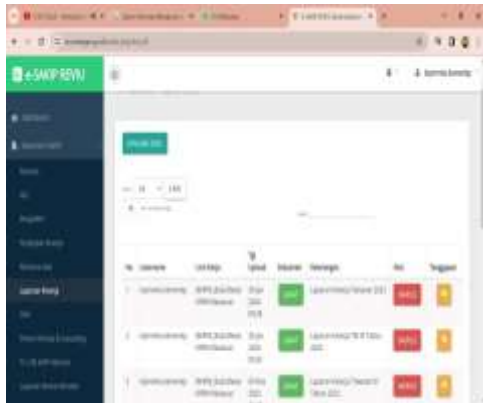
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Capaian perencanaan belum optimal disebabkan Renja masih dalam proses perbaikan
- Adanya potensi keterlambatan penyelesaian laporan kinerja dari setiap kegiatan untuk triwulan I tahun 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan laporan kinerja tahunan 2023 melalui aplikasi ESR Kemenpan RB
- Telah dilakukan dialog kinerja tanggal 2 Februari 2024 dimana salah satu substansi penyampaian materi adalah dokumen penetapa kinerja tahun 2024, selain itu juga dibahas strategi, risiko dan rencana aksi organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Penanggungjawab kegiatan melaporkan hasil capaian kegiatan tepat waktu	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan II Tahun 2024



Peran Pasia Dalam Rantai Nilai 2024
Tanggal 2 Februari 2024

1. Dalam rantai nilai merupakan suatu proses yang melibatkan antara produsen, pedagang, dengan antara pedagang untuk mendapatkan barang, maka dari itu mereka akan organisasi dalam upaya pencapaian rantai nilai.
2. Dalam rantai nilai dapat dilakukan pada marketing dan masalah atau kinerja sebuah organisasi dilakukan secara berkesinambungan karena pada saat ini sangat penting. Selain itu, dalam rantai nilai, juga dilakukan untuk berdaya saing, hingga mereka kerja sebagai bentuk yang di capaian kinerja sebuah organisasi.
3. Dalam rantai nilai juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan strategi antar pedagang pada sebuah organisasi.
4. Sampai saat ini belum dipublikasikan dokumen Rantai Nilai Tahun 2024 (tanggal 2024/02/02).
5. Seluruh pedagang agar selalu bersama dan berkolaborasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pedagang harus mempunyai peran/peserta yang jelas dalam organisasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan, yang dituangkan dalam dokumen Rantai Nilai (sasaran kinerja pedagang).

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 10	:	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100								
% Capaian	100%								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 : Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4;

Sm I : Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II : Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan: Capaian di akhir tahun 2024;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2023;

Pada triwulan I tahun 2024 tidak diterima temuan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan secara formal, sehingga capaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2023 tidak terjadi perubahan pencapaian, yakni sama 100%;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 11.644.000,- yang terdiri dari :

- Belanja bahan penggandaan dan pelaporan Rp. 8.044.000,-;
- Alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 3.600.000,-;

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan anggaran Rp. 2.027.500,- atau 17,41% yang digunakan untuk penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 985.500,- ;

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu total Rp. 16.400.000,-. Realisasi anggaran sampai triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 7.999.584 atau 48,78%. Terjadi penurunan realisasi sebesar 31,37% pada periode yang sama;

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Tindakan yang telah dilaksanakan

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pembayaran adalah telah dilakukan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah di-PDF-kan secara berkala;

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Meningkatkan pemahaman dan kecermatan verifikator keuangan dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja dengan <i>briefing</i> dan pengarahan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan II 2024

Dokumentasi kegiatan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 11	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	80	80	80	80	80	80	80		80
Realisasi	100								
% Capaian	125								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan I tahun 2024 tidak terdapat audit kinerja dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%, sama seperti pada periode triwulan I tahun 2023 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP sehingga nilai capaian kinerja adalah sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2023, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.646.063.000,- yang sampai dengan triwulan I tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.140.880.553,- atau 21,81% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Sedangkan pada tahun 2023 alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,- yang berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2023 dari pagu Rp. 16.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.999.584,- atau 48,78%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan sdm dalam mendukung iku ini.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;
2. Telah dilaksanakan briefing kepada tim pengelola kegiatan dan anggaran pada tanggal 26 Januari 2024, dengan substansi briefing salah satunya adalah pengelolaan kegiatan dan anggaran dan pemantauan hasil audit oleh itjen KKP.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan II tahun 2024

Tampilan layar pada aplikasi SIDAK
<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>



Tampilan layar pada aplikasi SIDAK
<https://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/9/373>



Briefing tgl 26 Januari 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 12	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	93,78								93,76
Realisasi	74,91								
% Capaian	79,89								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2022

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</p> <p>Ruang lingkup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. 2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. <p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (<i>spending better</i>) dan mendukung pemulihan ekonomi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan; 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; 4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ); 5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper; 6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (<i>value for money</i>); 7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi. <p>Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas perencanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 2. Kualitas pelaksanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontraktual (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Output (25%)

Capaian nilai IKPA pada triwulan I tahun 2024 sebesar 74,91 atau 79,89% dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran

- Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan tidak melebihi batas maksimal dalam satu tri wulan, nilai 100
- Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan, untuk rata- rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN dengan rata- rata deviasi kumulatif sampai Maret 2024 sebesar 0 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

$$100 - \text{rata rata deviasi kumulatif} = 100 - 0 = 100$$

Nilai rata-rata deviasi kumulatif tri wulan I diperoleh 100

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan dengan nilai 100

$$PA = \frac{\text{Penyerapan}}{\text{Target Penyerapan}} \times 100$$

$$PA = \frac{3.709.998.035}{3.709.998.035} \times 100$$

$$PA = 100$$

- Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

Ketepatan waktu, semua data kontrak disampaikan tepat waktu (bobot 40%)	:100	x	40%
	= 40		
akselerasi kontrak dini, terdapat kontrak pada triwulan I (bobot 30%)	:100	x	30%
	= 30		
akselerasi kontrak belanja modal, belanja modal belum dikontrakkan pada tri wulan I (bobot 30%)	: 100	x	30%
	= 30		
	Jumlah		
	= 100		

- Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Seluruh SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN tidak melebihi batas waktu, dengan nilai 100;

- Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

ketepatan waktu (bobot 50%)	:100 x 50%	= 50
persentase GUP (bobot 25%)	: 96,28 x 25%	= 24,07
setoran TUP (bobot 25%)	: 100 x 25%	= 25
	Jumlah	= 99,07

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan I :
Tidak ada dispensasi SPM :100

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

- Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :
ketepatan waktu, penyampaian data capaian output tepat waktu

(bobot 30%) : 0 x 30% = 0
 capaian RO, seluruh RO capaiannya mencapai 0%
 (bobot 70%) : 0 x 70% = 0
 Jumlah = 0

Pengukuran belum dapat dilakukan karena Kementerian Keuangan belum menyediakan fasilitas penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI;

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai 74,91 dengan rincian sebagai berikut

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
Nilai	100	100	100	100	100	99,07	100	0	74,91
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	10	10	20	10	10	9,91	5	00	
Nilai Aspek	100		99,81					0	

Realisasi Indikator kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 74,91 dari target tahunan sebesar 93,76 atau tingkat capaian kinerja 79,89%.

Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 yang tingkat capaian kinerjanya sebesar 107,58% mengalami penurunan sebesar 27,69%. Penurunan capaian ini karena pada periode triwulan I tahun 2024 komponen capaian output belum dapat diukur capaiannya (aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan belum siap digunakan).

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran T.A 2024 sebesar Rp.10.632.000,- digunakan untuk layanan manajemen keuangan. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.15.600.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.4.968.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.5.076.000,- atau 47,74% yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor dan suplis computer sebesar Rp.5.035.000,- dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.41.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar 10,83%, maka terjadi kenaikan sebesar 36,81%.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Capaian Output pada aplikasi SAKTI belum dapat diinput disebabkan aplikasinya sedang dalam tahap pengembangan pada menu capaian output;

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pada tanggal 26 Januari 2024 dilaksanakan briefing pagi yang salah satu substansi penyampaiannya adalah operasional capaian IKPA



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan komunikasi dengan KPPN Mitra dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan II

Indikator Pelaksanaan Anggaran

74.9% **SIMPAN DENGAN MARI!**

KID	KODE KEMASUKAN	KODE BAK	KODE SAJIBAN	URAIAN SAJIBAN	KETERANGAN	RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					REKORSAH-AKSI PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TITIK	PERSENTASE BERTAS	NILAI AKHIR PERJALANAN BERTAS
						REVISI SPN	REVISI KASUBSAJIBAN	PERFORMANSI ANGGARAN	SELISIR KONTASISTEM	PERSELESAIAN KEGIATAN	PERSELESAIAN UP DAN TUP	DEFINISI SPN	PERFORMANSI BERTAS				
1	130	022	427000	BALA-ZENAS KEMENTERIAN RIIL BENGKALAN	RIIL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.9%	100.00	0.00	74.9%	100%	74.9%	
				BALU DAN KEMBARAN HASIL PERKAWALAN BAKALAN	Baku	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Hasil Akhr	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					Hasil kopyak	100.00							0.00				

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 13	:	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	0	0	0	0	0	82		82
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0		
%Capaian	0	0	0	0	0	0	0		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.</p> <p>Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi kinerja anggaran regular dan evaluasi kinerja anggaran non-regular. Evaluasi kinerja anggaran regular dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan evaluasi kinerja anggaran non regular dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi kinerja anggaran regular terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja, Evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat Kementerian /Lembaga dan tingkat unit eselon 1 dan Evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat Kementerian /Lembaga dan tingkat unit eselon 1. Balai Besar KIPM Makassar menggunakan pengukuran kinerja anggaran menggunakan Aspek implementasi.</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dengan mengukur variabel-variabel Penyerapan Anggaran, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output dan efisiensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Anggaran : diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir • Konsistensi : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan • Capaian Output : Capaian output untuk satker pada aspek implementasi adalah capaian RO yang diukur dengan membandingkan antara RVRO dengan TVRO • Efisiensi :efisiensi untuk satker adalah Efisiensi RO dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran Seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan dan Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian RO. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi RO adalah Capaian RO, Pagu dalam DIPA terakhir, realisasi anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi terdiri atas:

- a. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (Sembilan koma tujuh persen).
- b. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- c. capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- d. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times WE)$$

NK : Nilai Kinerja aspek implementasi

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

Wp : Bobot Penyerapan Anggaran = 9,7 %

K : Antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruhnya satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulanan

Wk : Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi = 18,2 %)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target indikator kinerja keluaran

Wpk : Bobot Pencapaian Keluaran = 43,5 %)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran

WE : Bobot Efisiensi =28,6 %)

1. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Variabel Penyerapan Anggaran		
Triwulan I Tahun 2024		
Periode	RPD Bulanan (RA)	Realisasi Anggaran (AA)
1	1.138.415.801	1.138.416.600
2	1.320.060.151	1.346.936.851
3	1.334.173.044	1.224.644.584
4	882.570.916	
5	932.369.413	
6	1.523.606.658	
7	932.863.404	
8	792.766.061	
9	969.218.521	
10	1.199.729.993	
11	732.630.926	
12	602.285.112	
Jumlah	12.360.690.000	3.709.998.035
	Penyerapan	30

Nilai Kinerja Anggaran untuk aspek implementasi pada variable Penyerapan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P \times W_p &= 30 \times 9,7\% \\ NK &= 2,91 \end{aligned}$$

2. Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAKn : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDKn : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ken

n : jumlah bulan

Variabel Konsistensi			
Triwulan I Tahun 2024			
Periode	RPD	Realisasi Anggaran	Konsistensi Bulanan
1	1.138.415.801	1.138.416.600	100
2	1.320.060.151	1.346.936.851	102
3	1.334.173.044	1.224.644.584	92
4	882.570.916		0
5	932.369.413		0
6	1.523.606.658		0
7	932.863.404		0
8	792.766.061		0
9	969.218.521		0
10	1.199.729.993		0
11	732.630.926		0
12	602.285.112		0
Jumlah	12.360.690.000	3.709.998.035	294
Total Konsistensi Bulanan			98

Berdasarkan tabel diatas diperoleh Konsistensi sebesar 98 sehingga nilai kinerja pada aspek implementasi konsistensi adalah:

$$\begin{aligned} K \times W_k &= 98 \times 18,2\% \\ NK &= 17,84 \end{aligned}$$

Untuk Aspek pengukuran capaian realisasi output dan nilai efisiensi belum bisa dilaporkan pada triwulan I Tahun 2024 karena belum adanya himbuan dari kementerian keuangan terkait penginputan realisasi capaian output pada Aplikasi SAKTI 2024.

Dari empat aspek tersebut diperoleh nilai kinerja pada triwulan I tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :



Aspek	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Penyerapan	30	9,7%	2,91
Konsistensi	98	18,2%	17,84
Capaian Realisasi Output	-	43,5%	-
Nilai Efisiensi	-	28,6%	-
Jumlah			20,75

Sebagai bahan perbandingan capaian nilai kinerja anggaran untuk triwulan I 2024 dan triwulan I 2023

Aspek Implementasi	Bobot	Triwulan I 2024		Triwulan I 2023	
		Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir
Penyerapan	9,70%	30	2,91	17,54	1,7
Konsistensi	18,20%	98	17,84	101	18,5
Capaian realisasi output	43,50%	0	0,00	6,65	2,89
Efisiensi	28,60%	0	0,00	67,09	19,19
Nilai Kinerja Anggaran		20,75		42,28	

Berdasarkan tabel perbandingan capaian nilai kinerja anggaran untuk triwulan I 2024 dan triwulan I 2023 terjadi penurunan nilai sebesar 21,53 persen. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut adalah karena masih kosongnya nilai kinerja pada aspek capaian realisasi output dan efisiensi yang menjadi bagian dari variabel IKU Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi penyerapan untuk triwulan I tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023

Aspek Implementasi	Triwulan I 2024 (%)	Triwulan I 2023 (%)	Perbandingan (%)
Penyerapan	2,91	1,7	↑ 1,21
Konsistensi	17,84	18,5	↓ 0,66
Capaian Realisasi Output	0	2,89	↓ 100
Nilai Efisiensi	0	19,19	↓ 100

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp71.621.000, sampai dengan triwulan I 2024 telah terealisasi sebesar Rp52.691.384 atau 73,57% yang digunakan untuk

- Rapat kerja teknis BKIPM
- Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan

Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 40,39 % dari triwulan I 2024 jika dibandingkan triwulan I 2023. Peningkatan realisasi ini disebabkan karena Pagu anggaran tahun 2024 lebih kecil dibanding pagu anggaran tahun 2023 sehingga serapan realisasi lebih cepat.
 Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

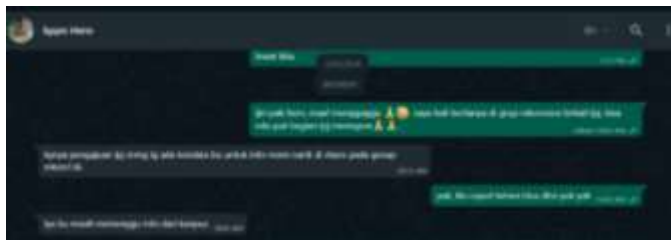
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah yang terjadi karena blm adanya himbauan dari kementerian keuangan untuk melakukan penginputan capaian output yang merupakan salah satu variabel dalam perhitungan NKA(Aplikasi belum siap) sehingga perhitungan NKA pada satker Balai Besar KIPM Makassar masih dalam proses.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menindaklanjuti rekomendasi triwulan IV 2023 operator smart dja telah melakukan komunikasi dengan petugas KPPN Makassar II terkait pelatihan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI namun pada triwulan I 2024 baru dapat dilaksanakan pelatihan implementasi aplikasi MonSAKTI (BMN, Persediaan, dan GLP) .

Tangkapan layar komunikasi operator SMART DJA dengan Petugas KPPN Makassar II (136)



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi Operator SMART melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi. 	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Triwulan II Tahun 2024

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW I BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terkelolanya pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 14	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	0	0	0	0	0			80,00
Realisasi	69,8								
% Capaian	87,25								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.</p> <p>Perlu kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksanaannya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%) 3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%) 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %) <p>Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur: sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) <ul style="list-style-type: none"> Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di palikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Paket Penyedia sebanyak 4 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 28.604.000,- b. Paket Swakelola sebanyak 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.481.619.000,- c. Paket Penyedia dalam swakelola sebanyak 78 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.513.259.000,- <p>Realisasi rencana umum pengadaan = 20%; Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti rapat Evaluasi RUP dan Rapat Validasi pada TW I Tahun 2024 dengan waktu dan lokasi sebagai berikut:</p>

a. Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024

Pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.15 Wita sampai 13.00 Wita, bertempat di kantor Stasiun KIPM Yogyakarta diikuti secara virtual meeting.

Tujuan kegiatan adalah Evaluasi RUP dan tersusunnya RUP tahun 2024 lingkup BPPMHKP Tahun 2024. Kegiatan evaluasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BPPMHKP

b. Validasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024

Pada tanggal 13 Maret 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti rapat Validasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Tujuan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pengelolaan serta tersusunnya RUP lingkup KKP Tahun 2024 yang telah divalidasi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Tim Kerja/ Koordinator Layanan Pengadaan Biro Umum dan PBJ, Setjen KKP dan pada kesempatan tersebut Balai Besar KIPM Makassar dinyatakan tuntas

Pada TW I Tahun 2024 Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP terealisasi 20% dan pada TW I 2023 Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP terealisasi 20% dengan demikian perbandingan presentase realisasi TW I Tahun 2024 dengan TW I Tahun 2023 ada sama 20%.

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan belanja modal, sehingga pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE tidak mungkin dilaksanakan. Dengan demikian, untuk menyederhanakan perhitungan unsur ini diberikan bobot nilai 30 %

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa perlu dilakukan pencatatan dan penginputan data laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (0 %)

Pada TW I Tahun 2024 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa masih 0% dan pada TW I 2023 Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa masih 0% dengan demikian perbandingan presentase realisasi TW I Tahun 2024 dengan TW I Tahun 2023 ada sama 0%.

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada triwulan I 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Tabel progres kegiatan pengadaan barang/ jasa secara E-Purchasing, pagu, realisasi anggaran dan bobot persentase melalui SPSE pada TW I Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Pagu (Rp.)	Realisasi (Paket)	% (Paket)	Realisasi (Rp.)	% (Rp.)
1	E-Purchasing	18	182.017.000,-	6	33,33	10.803.500,-	5,94

Rincian Realisasi kegiatan dan anggaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/ E-Purchasing pada TW I adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan layanan manajemen keuangan sebesar Rp. 4.515.000,-
2. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan evaluasi dan pelaporan sebesar Rp. 985.500,-
3. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan sebesar Rp. 1.574.000,-
4. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan sertifikasi CPIB pada suplier sebesar Rp. 1.827.000,-
5. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan surveilan sebesar Rp. 885.000,-
6. Pengadaan ATK dan Komputer Suplies kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan sebesar Rp. 1.017.000,-

Realisasi adalah $5,94\% / 30\% \times 100\% = 19,8\%$

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini adalah $= 20\% + 30\% + 19,8\% = 69,8\%$ dari target 80 % sehingga tingkat capaiannya sebesar $(69,8\% / 80\%) \times 100\% = 87,25\%$.

Pada TW I 2024 persentase IKU ini terealisasi sebesar 69,8%, jika dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada TW I 2023 yaitu sebesar 50% maka terjadi peningkatan sebesar 19,8%

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 8 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul BMN).

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 214.456.000,-

Yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 43.546.000,-
2. 3987.EBA.994 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh = Rp. 45.000.000,-
3. Pas Pelabuhan Laut/ Udara = Rp. 42.000.000,-
4. 3987.EBA.994 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu = Rp. 84.000.000,-

Adapun realisasi anggaran mendukung IKU ini sebagai berikut :

Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 23.787.983,- atau 11,09 % berupa :

- 1.1 Pas Pelabuhan Laut/ Udara = Rp. 42.000.000,-

Realisasi pengadaan pas pelabuhan laut/ udara sudah terealisasi sebagai berikut :

- Pas orang dengan terealisasi sebesar Rp. 450.000,-
- Pas Kendaraan dengan terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,-

- 1.2 3987.EBA.994 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu = Rp. 84.000.000,-

- Jamuan tamu kedinasan terealisasi sebesar Rp. 22.137.983,-

Pada TW I Tahun 2024 persentase dan realisasi anggaran IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebesar Rp. 23.787.983,- atau bobotnya 11,09 %, sedangkan pada TW I 2023 realisasinya adalah Rp. 0 atau bobotnya 0% sehingga mengalami peningkatan sebesar 11,09%

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi keterlambatan Pengadaan ATK dan Komputer Suplies melalui Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) karena ketersediaan barang dibutuhkan pada e-katalog terbatas
- Penyerapan anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan Pengadaan makanan/ minuman Penambah Daya Tahan Tubuh relatif rendah karena pegawai yang berhak menerima fasilitas pas pelabuhan laut/ udara dan makan/ minuman penambah daya tahan tubuh jumlahnya berkurang sebagaimana pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Semula	Menjadi	Keterangan
1	Makanan/ minuma penambah daya tahan tubuh	59 orang	4 orang	Beberapa pegawai dimutasi ke Barantin Prov. Sulawesi Selatan
2	Pas Bandar Udara (pas orang)	83 orang	21 orang	
3	Parkir berlangganan (pas kendaraan)	38 kendaraan	17 kendaraan	
4	Pas Pelabuhan Laut	13 kendaraan	7 kendaraan	

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara operator komitmen dan operator persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan ke dalam aplikasi SAKTI
- Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa telah memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang/ jasa

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak penyedia terkait penyediaan barang dalam SPSE; - Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan anggaran Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Triwulan II Tahun 2024

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terkelolanya pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 15	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00
Realisasi	62,5	-	-	-	-	-	-	-	
% Capaian	78,13	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan :

- Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada triwulan I, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%).
 Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2022 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas,

pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:

- Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.
- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.324.260.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.249.000.000,-
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.237.939.000,-

Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan pada triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kendaraan telah terealisasi senilai Rp.53.852.441,- dari nilai pagu anggaran Rp.324.260.000,- atau 16,61 %
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan telah terealisasi senilai Rp.4.545.500,- dari pagu anggaran Rp.249.000.000,- atau 1,82 %
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi senilai Rp.68.531.990,- dari pagu anggaran Rp.237.939.000,- atau 28,80 %

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 % dari nilai bobotnya, atau capaiannya sebesar :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times \text{Bobot} \\ &= \frac{\text{Rp.296.336.941}}{\text{Rp.811.199.000}} \times 12,5 \% \\ &= 4,56\% \end{aligned}$$

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

Pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi belanja modal pada RKAKL Balai Besar KIPM Makassar, sehingga usulan penetapan status untuk pengadaan belanja modal tahun 2024 tidak mungkin dilaksanakan. Akan tetapi penetapan status penggunaan Barang Milik Negara Balai Besar KIPM Makassar pada aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

No	Kategori	Status Penggunaan	Lokasi	Tanggal	Jumlah	Nilai	Status	Lokasi	Tanggal	Jumlah	Nilai	Status
1	Perawatan	100%										
2	Perawatan	100%										
3	Perawatan	100%										
4	Perawatan	100%										
5	Perawatan	100%										

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 25%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%).

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar belum mengusulkan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat karena menunggu penutupan periode 14 tahun 2023 (*audited*) pada Aplikasi SAKTI Modul GLP, Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan.

Dengan demikian, IKU ini sudah terealisasi sebesar 0%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

Tahun Anggaran 2024 tidak tersedia alokasi anggaran kegiatan belanja modal sehingga penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk pencapaian target realisasi maka di berikan bobot sebesar 25%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)
 Pada Triwulan I belum melakukan pencatatan dan penginputan data laporan tahun 2024 karena menunggu penutupan periode 14 tahun 2023 (*audited*) pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan serta penyusunan laporan BMN belum dilaksanakan karena belum sampai pada periode pelaporan (semesteran/ tahunan).

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan I adalah :

Unsur 1 (12,5%) + Unsur 2 (25%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (25%) + Unsur 5 (0%) = 62,5 % dari target 80%
 Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(62,5\%/80\%) \times 100\% = 78,13 \%$.

Jika dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 22,8%, maka capaian di triwulan yang sama mengalami kenaikan realisasi sebesar 39,7%.

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 2.822.713.000,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	10.950.000	1.900.000	9.050.000	17,35
2	Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan	12.000.000	-	12.000.000	-
3	Layanan rumah tangga dan perlengkapan	13.955.000	2.419.500	11.535.500	17,34
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langganan Daya dan Jasa	895.380.000	247.101.174	648.278.826	27,60
5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langganan Perawatan kendaraan bermotor	347.314.000	57.963.941	289.350.059	16,69
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langganan Perawatan Gedung dan Bangunan	249.900.000	4.545.500	245.354.500	1,82
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langganan Keamanan Kantor, Pengemudi dan Pramu Bakti	1.293.214.000	287.061.000	1.006.153.000	22,20
TOTAL		2.822.713.000	600.991.115	2.221.721.885	21,29

Dengan demikian realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 600.991.115,- atau (21,29%).

Jika dibandingkan tahun 2023 dengan pagu total pendukung kegiatan sebesar Rp.42.339.000,-. Dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.2.995.000,- atau (7,07%) terjadi kenaikan realisasi yang sangat signifikan sebesar 14,22% di triwulan yang sama.

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 8 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Muda,

4. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,
5. Operator SAKTI Modul Persediaan,
6. Operator SAKTI Modul GLP,
7. Pengelola BMN,
8. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana tidak memahami uraian tugas sebagai tanggung jawabnya, sehingga saat ini tugas hanya dilaksanakan oleh Analis Laporan BMN.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Operator modul komitmen telah melaksanakan penginputan/pendetailan barang persediaan sesuai ketentuan.
2. Pemeliharaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan meliputi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<p>Meningkatkan pemahaman Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana melalui pendampingan yang intensif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator Persediaan : Niza Mahaputri 2. Pendataan BMN : Hapi, SAP 3. Pengadministrasi Sarpras : Halim <p>Pendamping : Kamdani, S.Pi, MP , Abdul Mubarak Azis</p>	<p>Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial</p>	<p>Triwulan II Tahun 2024</p>

KEGIATAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4



KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR



KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK



KEGIATAN PEMELIHARAAN PRINTER



--	--

